

# KONSTRUKSI GERAKAN ISLAM FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DI KOTA MAKASSAR



## Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik  
pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ARI FEBRIANSYAH ISMAIL

NIM. 30600112096

ALAUDDIN  
MAKASSAR

FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
MAKASSAR

2016

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Konstruksi Gerakan Islam Front Pembela Islam (FPI) Di Kota Makassar” yang disusun oleh Ari Febriansyah Ismail, Nim : 30600112096, Mahasiswa jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada 17 April 2017 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin Filsafat dan Politik Jurusan Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan)

**Makassar 1 Juni 2017**

### Dewan Penguji

Ketua	: Dr. Abdullah Thalib M. Ag	(.....)
Sekretaris	: Syahrir Karim S. Ag., M.Si, Ph. D	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr H. Moch. Qasim Mathar, MA	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. A. Darussalam, M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Syahrir Karim S. Ag., M.Si, Ph. D	(.....)
Pembimbing II	: Syamsul Asri, S. IP., M.Fil	(.....)


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Di ketahui oleh :

Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik

UIN Alauddin Makassar,

  
**Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.**  
Nip : 19590704 198903 1 003



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ari Febriansyah Ismail  
Nim : 3060012096  
Jurusan/Prodi : Ilmu Politik  
Program Studi : S1  
Fakultas : Ushuluddin, Filsafat,&Politik  
Judul Skripsi : Konstruksi Gerakan Islam Front Pembela Islam (FPI) Di Kota  
Makassar


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plangiasi dari karya/penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh dewan anggota penguji.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Makassar, 1 Juni 2017

Yang Menyatakan:



**Ari Febriansyah Ismail**  
**NIM: 30600112096**

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah rabbil'alam*, segala puji syukur ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Konstruksi Gerakan Islam Front Pembela Islam Di Kota Makassar**”.

. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw., sebagai *uswatun hasanah* dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.

Melalui tulisan ini saya ucapkan untuk yang teristimewa dan yang utama sekali penulis sampaikan terima kasih yang paling tulus kepada Ayahanda dan Ibunda serta saudara-saudaraku, yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi melalui perhatian dan kasih sayang, nasehat, dukungan moril serta materil terutama doa restu demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka korbakan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan di akhirat.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak baik berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun do'a. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin Makassar.



3. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Syahrir Karim, M.Si. Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik.
4. Bapak Syahrir Karim, M.Si. Ph.D. selaku Pembimbing I dan Bapak Syamsul Asri, S.IP. M. FIL. I selaku Pembimbing II yang telah sabar dan banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran, dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr H. Moch. Qasim Mathar, MA selaku Munaqisy I dan Bapak Dr. H. A. Darussalam, M. Ag selaku Munaqisy II yang telah sabar dan banyak memberikan nasehat, saran dan dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama berada di bangku kuliah.
7. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik yang telah bersedia melayani penulis dari segi administrasi dengan baik selama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2012 yang telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi serta dukungan dan canda tawa yang menyisakan kesan mendalam di hati.
9. Kanda-kanda senior dan adik-adikku, serta seluruh warga **HMJ Ilmu Politik** sebagai keluarga keduaku atas pengalaman dan nasehat-nasehatnya sehingga penulis dapat lebih mengerti arti pentingnya kebersamaan.

10. Sahabat-sahabatku **Annisa Bachtiar, Nurul Azizah, Fitriani Nursusanti, Aqisyah Rifdaeni Amalia** dan **Farid Abdullah** yang tak pernah bosan mengingatkan dan memberi semangat dalam menjalani masa-masa kuliah.
11. Teman-teman seperjuanganku selama **KKN Reguler Angkatan 5** di Desa Labuaja, Kec.Cenrana Kab.Maros yang selalu memberi semangat dalam menjalani proses ini.
12. Teman-teman yang telah membantu penulis dalam proses pengambilan data di lapangan telah banyak memberikan bantuan berupa moril dan materil yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Rasa terima kasih yang tiada hentinya penulis haturkan, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Swt., dan mendapat pahala yang setimpal. Amin.

Akhirnya, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

*Amin Ya Rabbal Alamin*



Makassar, 5 April 2017

**Penulis**

## Daftar ISI

**JUDUL**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**Daftar ISI** .....i

**Daftar Tabel** .....ii

**ABSTRAK** .....iii

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Tinjauan Teoritis .....	11
F. Metode Penelitian .....	21

### **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kota Makassar .....	25
B. Gambaran Umum Front Pembela Islam .....	29

### **BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Konstruksi Gerakan Ideologi Front Pembela Islam Di Kota Makassar .....	48
B. Pola Gerakan Politik Front Pembela Islam Di Kota Makassar .....	57

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

**NamaPenulis** : Ari Febriansyah Ismail  
**Nim** : 30600112096  
**Judul Skripsi** : *“KonstruksiGerakan Islam Front Pembela Islam (FPI) Di Kota Makassar”*

---

Skripsi ini membahas tentang Konstruksi Gerakan Islam Front Pembela Islam Di Kota Makassar. Latar belakang masalah ini berbicara mengenai Front Pembela Islam merupakan salah satu organisasi-organisasi Islam yang cukup penting pasca masa reformasi Indonesia. FPI didirikan tepat pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-53, tanggal 17 Agustus 1998. Bertempat di Pesantren Al- Umm Ciputat Jakarta, sedangkan sejarah masuknya Front Pembela Islam (FPI) di Kota Makassar yaitu tepatnya pada tahun 2005 yang dibawah oleh Habib Machmud bin Umar al Hamid. Pertemuan awal dan deklarasinya di kompleks Unhas lama Jl. Sunu, Kota Makassar yang dihadiri ketua umum dewan pimpinan pusat (DPP) Front Pembela Islam (FPI) Habib M. Rizieq Shihab dan beberapa anfidzi DPP. Dengan membawa Visi dan Misi menegaskan “Amar Ma’ruf Nahi Mungkar”. Dalam skripsi ini peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi gerakan Islam Front Pembela Islam (FPI) dan mengetahui bagaimana pola yang dilakukan oleh FPI terhadap proses demokrasi yang ada di kota Makassar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori “gerakan sosial, Islamisme dan Radikalisme” untuk menganalisis kejadian yang diamati oleh peneliti.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan mengenai “Konstruksi Gerakan Politik Front Pembela Islam (FPI) Di Kota Makassar”. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *library research* yang meliputi kutipan langsung dan tidak langsung dan *filed research* meliputi observasi, wawancara dan dokumenter. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan historis teologis dan politik.

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa, sejak awal Front Pembela Islam (FPI) yang didirikan di Kota Makassar pada tahun 2005 memang di desain sebagai organisasi keagamaan, yang dimana FPI menganut paham “*ahlus sunnah wal jamaah*” yang berideologi Islam atau Islamisme dan FPI juga memiliki prinsip perjuangan menegaskan “*amar ma’ruf nahi mungkar*”. Dengan landasan tersebut, FPI mencoba merangkainya menjadi sebagai metode perjuangan termaksud dalam kegiatan politiknya membawa visi misi menegaskan “*amar ma’ruf nahi mungkar*” untuk penerapan syariat Islam secara kaffah atau menyeluruh. Dalam setiap gerakan politiknya FPI di Kota Makassar, FPI hanya berorientasi kepada partai Islam saja yang menyuarakan kepentingan ummat dan mendukung penerapan syariat Islam. Keberadaan FPI dalam posisi organisasi keagamaan dan organisasi politik di Kota Makassar sangat besar peluangnya untuk melakukan fungsi pengawasan, kontrol, saran serta kritik dalam rangka memasukkan ide-ide Islami demi kepentingan umat Islam di Indonesia khususnya di Kota Makassar.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pasca tumbangannya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 dalam situasi politik yang sedang mengalami perubahan tersebut, muncul dan berkembang gerakan-gerakan sosial, baik yang menuntut perubahan politik maupun gerakan-gerakan sosial di daerah-daerah yang menuntut keadilan ekonomi politik. Gerakan sosial berkembang dalam atmosfir politik yang sedang berubah dan momentum perubahan politik 1998,<sup>1</sup> diwarnai dengan munculnya aktor "Gerakan Islam Baru" (*New Islamic Movement*).

Aktor baru ini berbeda dengan aktor gerakan Islam lama, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, al Irsyad, al Wasliyah, Jamaat Khair dan sebagainya. Organisasi gerakan Islam baru ini memiliki basis ideologi, pemikiran dan strategi gerakan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam sebelumnya, memiliki karakter yang lebih militan, radikal, skripturalis, konservatif, dan eksklusif dengan visi dan misi mewujudkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh, sehingga memperoleh keberuntungan hidup dunia-akhirat dan membawa rahmat bagi bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Secara keseluruhan kelompok ini menganut paham "*salafisme radikal*", yakni berorientasi pada penciptaan kembali masyarakat salafi (generasi Nabi

---

<sup>1</sup>Wahyuni. *Gerakan Sosial Islam*. (Alauddin University Press. Makassar. 2014.) Hal 7.

<sup>2</sup>Azman. *Penerapan Syariat Islam Di Indonesia*. (Alauddin University Press. Makassar . 2014.) h.43.

Muhammad dan para sahabatnya), dengan cara-cara keras dan radikal. Gerakan ini memiliki tujuan menghidupkan masyarakat Islam, membentuk kepribadian Islami, dan mengantarkan hukum Islam.<sup>3</sup> Schacht mengungkapkan “Islam lebih dari sekedar agama, ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan”.<sup>4</sup>

Bagi kelompok ini Islam pada masa kaum salafi inilah merupakan Islam paling sempurna, masih murni dan bersih dari berbagai tambahan atau campuran (*bid'ah*) yang dipandang mengotori Islam. Gerakan Islam versi mereka lebih bercorak konfrontatif terhadap sistem sosial dan politik yang ada, menghendaki adanya perubahan mendasar terhadap sistem yang ada saat ini (yang mereka sebut sistem sekuler atau *jahiliyah modern*), dan berupaya menggantinya dengan sistem baru yang mereka anggap sebagai sistem Islam (*nidzam Islam*).<sup>5</sup>

Islam adalah agama yang serba lengkap dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Al Qur'an ibarat supermarket telah menyediakan sistem politik yang mesti diikuti oleh umatnya. Hal demikian diimplementasikan oleh Nabi Muhammad saw dalam membangun Madinah sebagai negara dan pemerintahan pertama dalam sejarah Islam yang kemudian dilanjutkan oleh

---

<sup>3</sup>Yusuf Al- Qaradhawi. *Konsep Islam Solusi Utama Bagi Umat*. (Senayan Abadi Publishing. Jakarta Selatan. 2004.) h.178.

<sup>4</sup>Muhammad Firdauz. *Komunikasi Politik Islam*. (Alauddin University Press. Makassar. 2012.) h.43.

<sup>5</sup> Andri Rosaidi,. *HITAM PUTIH FRON PEMBELA ISLAM (FPI)*. Jurnal.cetakan I, Juli (2008).



khalifah-khalifah sesudah beliau. Inilah yang mesti diteladani dan diikuti umat Islam.<sup>6</sup>

Islam sebagai alternatif (*al-Islam kabadil*), Islam adalah solusi (*al-Islam huwa al-hall*). Syariat Islam adalah solusi massif, dan merupakan jargon-jargon yang menyemangati gerakan mereka. Andri Rosadi mengidentifikasi bahwa organisasi ini adalah: Kelompok Tarbiyah, yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad (Yogyakarta), Laskar Jundullah (Sulawesi Selatan), dan Front Pembela Islam (FPI).<sup>7</sup>

Reformasi yang mengusung kebebasan untuk mengekspresikan ide dan pemikiran sekontroversial apapun menjadi semacam pupuk bagi tumbuh suburnya gerakan-gerakan radikal yang selama ini kurang mendapatkan ruang efektif untuk berkembang. Perkembangan kelompok-kelompok radikal dengan berbagai model dan bentuk, gerakan dan simbol tumbuh subur semenjak bergulirnya reformasi. Ide pembentukan Negara Islam, penerapan hukum Islam (*Syari'ah*) dan penolakan terhadap dominasi barat sangat dominan dalam *discours* beberapa kelompok radikal yang ada<sup>8</sup>

Front Pembela Islam merupakan salah satu organisasi-organisasi Islam yang cukup penting pasca masa reformasi Indonesia. FPI lahir bersamaan dengan

---

<sup>6</sup>Muhammad Firdaus. *Komunikasi Politik Islam*. (Alauddin University Press. Makassar.) 2012. h.32.

<sup>7</sup>Andri Rosaidi. *HITAM PUTIH FRON PEMBELA ISLAM (FPI)*. Jurnal.cetakan I, Juli (2008). 237 halaman.

<sup>8</sup>Mahmud Syaefuddin. *Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 34, No.2, Juli – Desember ( 2014). h.263.

naiknya Habibie menjadi presiden setelah presiden Soeharto mengundurkan diri. FPI didirikan tepat pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-53, tanggal 17 Agustus 1998. Bertempat di Pesantren Al- Umm Ciputat Jakarta Selatan pimpinan K.H. Misbahul Anam, yang dideklarasikan oleh Habib Muhammad Rizeq Syihab.<sup>9</sup>

Front Pembela Islam (FPI) di Kota Makassar sendiri sudah berjalan 5 (lima) tahun dengan metode dakwah Dzikir, Taklim dan Tabligh. Pada tahun 2010 untuk ketua DPD Front Pembela Islam (FPI) Sulawesi Selatan diamanahkan kepada Habib M. Reza Alhamid yang dideklarasikan di Mesjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar oleh ketua umum Habib M. Rizieq Shihab (Dewan Pimpinan Pusat). Dengan Visi dan Misi menegaskan “Amar Ma’ruf Nahi Mungkar”. Hal ini sesuai dengan ayat Al Qur’an Surah Al Imran ayat 104, 110 dan hadits.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahan :

M A K A S S A R

104. dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung. [217] Ma’ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.( Q.S Al-Imron ayat 104)<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Jajang Jahroni dan Jamhari. *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*. (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.) h.23.

<sup>10</sup> Al. Qur’an Surah Al-Imran ayat 104.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

110. kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.<sup>11</sup>

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  
لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ  
يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

Terjemahan :

Nabi Muhammad saw. bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, hendaknya kalian benar-benar mengajak kepada yang ma'ruf dan benar-benar mencegah dari yang munkar atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan hukuman/siksa kepada kalian sebab keengganan kalian tersebut, kemudian kalian berdo'a kepada-Nya namun do'a kalian tidak lagi dikabulkan.” (HR. Tirmidzi dari Hudzaifah ibn al-Yaman, hadits no. 2095).<sup>12</sup>

a. Dalam menegakkan amar ma'ruf FPI mengutamakan metode lemah-lembut dengan langkah :

- 1) Mengajak dengan hikmah (ilmu dan amal)
- 2) Memberi Mau'izhoh Hasanah
- 3) Berdiskusi dengan cara yang terbaik,

b. Dalam menegakkan nahi mungkar FPI mengutamakan metode tegas dengan langkah:

<sup>11</sup>Al. Qur'an Surah Al-imran ayat 110.

<sup>12</sup>Hadits Tirmidzi no 2095.

- 1) Menggunakan kekuatan/kekuasaan bila mampu
- 2) Bila langkah pertama tidak mampu, menggunakan lisan dan pena
- 3) Bila kedua langkah tadi tidak mampu, menggunakan hati yang tertuang dalam ketegasan sikap.<sup>13</sup>

Gerakan politik FPI memang tidak berafiliasi terhadap salah satu kekuatan politik tertentu. Dalam menghadapi pemilu pada tanggal 7 Juni tahun 1999, misalnya FPI menyatakan sikap netral terarah. Yang di maksud netral terarah adalah tidak berkampanye untuk satu partai tertentu, sedangkan terarah berarti FPI hanya mendukung partai Islam yang memperjuangkan hak-hak Allah dan hak-hak makhluk-Nya dengan menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Dengan ungkapan lain, penegakan moral dan agama merupakan kegiatan FPI yang utama.<sup>14</sup> Pada Pemilu tahun 2014 yang lalu FPI menyatakan pandangan dan sikap sebagai pencerahan bagi umat Islam di Indonesia sebagai berikut

1. Kepada umat Islam yang akan menjadi pemilih dalam Pemilu 2014 yang akan datang, agar TIDAK menjadi korban penipuan kaum sekuleris dan liberalis maupun Parpol sekuler lainnya, maka umat Islam yang berkehendak menggunakan hak memilihnya, dianjurkan memilih calon-calon anggota legislatif (DPD, DPR RI, DPRD Propinsi maupun DPRD kota/kabupaten) yang memiliki komitmen penengakkan syariat Islam dari

---

<sup>13</sup>Pasal 7 Anggaran Dasar Front Pembela Islam.

<sup>14</sup>Jajang Jahroni dan Jamhari. *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*. (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.2004.) h.136-137

Parpol yang secara tegas berazaskan Islam dan memiliki keberpihakan terhadap umat Islam<sup>15</sup>.

Pada “Gerakan Islam Simbolik Politik Kepentingan FPI”. Kajian buku ini mengajak membaca untuk mencermati secara kritis segala sesuatu yang terkait dengan gerakan Islam dengan menggunakan simbol-simbol agama di setiap aksi atau gerakan yang mereka (FPI) lakukan, cermin dari adanya proses komodifikasi dan politisasi agama dalam proses sosial. Dalam gerakan ini, Islam hanya berfungsi sebagai alat legitimasi gerakan politik. Sebab, pada hakikatnya gerakan ini hanya merupakan perpanjangan tangan dari suatu kekuatan politik yang sebenarnya tidak memiliki spirit keagamaan. Di sini, penggunaan simbol, bahasa, dan tokoh Islam hanya sebagai bungkus untuk menutupi kepentingan politik yang sedang dimainkan.<sup>16</sup>

FPI yang dikenal sebagai Islam radikal yang di mana kelompok ini memiliki keyakinan ideologis tinggi dan fanatic yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung dan menggantinya dengan Syariat Islam. Dalam kegiatan mereka seringkali menggunakan aksi-aksi yang keras, bahkan tidak menutup kemungkinan kasar

---

<sup>15</sup><https://www.annah.com/news/2013/08/31/sikap-fpi-pemilu-2014-darurat-umatislam.html#sthash.6zhE1crA.dpuf>. Diakses pukul 08.00

<sup>16</sup>Syaefuddin. Mahmud. *Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 34, No.2, Juli – Desember ( 2014). h.268.

terhadap kegiatan kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka dan seringkali bergerak secara bergeriliya.<sup>17</sup>

Sifat keras yang melekat pada kelompok ini berasal dari keinginan mereka untuk menjalankan agama Islam secara mendasar yang tercermin dalam keinginan kelompok ini untuk menjalankan syariat Islam secara keseluruhan.<sup>18</sup> Tetapi hal yang sangat membedakan FPI dari organisasi Islam radikal lainnya adalah posisi FPI terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fealy, menyebutkan bahwa, bagi FPI NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk akhir dari sistem kenegaraan di Indonesia. Karenanya, gerakan FPI terlihat lebih menekankan pada permasalahan moralitas umat Islam di Indonesia.<sup>19</sup>

Dengan melihat penjelasan di atas maka penulis berasumsi bahwa konstruksi gerakan Islam yang dilakukan FPI sangatlah berpengaruh khususnya di kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konstruksi gerakan ideologi FPI di kota Makassar ?
2. Bagaimana pola gerakan politik FPI di kota Makassar ?

---

<sup>17</sup>Jajang Jahroni. dan Janhari. *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*.(PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.2004.) h.2-3.

<sup>18</sup>Jajang Jahroni. *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*.(PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.2004). h.10.

<sup>19</sup>Endang Suryana Priyatna. *Cyber-FPI : Kontentasi Identitas Nasional Dan Identitas Islam*.Tesis Mahasiswa Jurusan Ilmu Sastra Fakultas Ilmu Pengatahuan Budaya Universitas Indonesia Depok. Juli 2012



### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

#### 1. Tujuan penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi tujuan yang di harapkan dan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana konstruksi ideologi gerakan politik FPI dan pola gerakan politik FPI di kota Makassar.

#### 2. Manfaat penelitian.

Dalam penelitian ini menjadi manfaat penelitian adalah

- a. Untuk dapat meningkatkan kemampuan berfikir peneliti melalui karya ilmiah, sekaligus penerapan ilmu yang telah di peroleh.
- b. Untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai informasi tentang bagaimana konstruksi gerakan ideologi FPI dan pola gerakan politik FPI di kota Makassar.

### D. Tinjauan Pustaka.

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis lainnya terhadap tema skripsi yang mirip yaitu sebagai berikut :

1. **Setiawan.** Mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama.Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.Skripsi berjudul “Orientasi Tindakan Dalam Gerakan *Nahi Mungkar* Front Pemuda Islam Yogyakarta”.Peneliti bertujuan mendeskripsikan pandangan FPI tentang

gerakan *NahiMungkar*, beserta mengetahui bagaimana gambaran ideal gerakan pergerakannya di tengah masyarakat.<sup>20</sup>

2. **Aulia Pertiwi.** Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi berjudul “Analisi Kriminalogis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Oleh ORMAS FPI (FRONT PEMBELA ISLAM) Di Wilayah Hukum Kota Makassar(Studi Kasus : 2011-2013)”. Peneliti bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh Ormas FPI.<sup>21</sup>
3. **Arianti,** Mahasiswa Jurusan Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Universitas Hasanuddin Makassar. Tahun 2014. Skripsi Berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Dalam Kaitannya Dengan Konflik Keagamaan Di Kota Makassar”. Peneliti bertujuan untuk mengetahui eksistensi Front Pembela Islam (FPI) terhadap aksinya sebagai organisasi masyarakat dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di kota Makassar<sup>22</sup>
4. **Nurotul Badriyah,** Mahasiswa Jurusan Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Tahun

---

<sup>20</sup>Setiawan.“*Orientasi Tindakan Dalam Gerakan Nahi Mungkar Front Pemuda Islam Yogyakarta*”.Skripsi Mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama.Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

<sup>21</sup>Aulia Pertiwi. “*Analisi Kriminalogis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Oleh ORMAS FPI (FRONT PEMBELA ISLAM) Di Wilayah Hukum Kota Makassar (Studi Kasus : 2011-2013)*”. Skripsi Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.2015.

<sup>22</sup>Arianti.“*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Dalam Kaitannya Dengan Konflik Keagamaan Di Kota Makassar*”. Skripsi Mahasiswa Jurusan Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Universitas Hasanuddin Makassar. Tahun 2014.

2013. Skripsi Berjudul “*Amar Ma’ruf Nahi Mungkar Dalam Perspektif Front Pembela Islam (FPI)*” Studi Kasus Di Surabaya. Peneliti bertujuan untuk mengetahui konsep *amar ma’ruf nahi mungkar* dalam pandangan FPI dan untuk mengetahui pengaplikasiannya dalam perspektif FPI.<sup>23</sup>

5. **Dodiana Kusuma**, Mahasiswa Jurusan Komonikasi Dan Penyiaran Islam fakultas Dakwah Dan Komonikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2010. Skripsi berjudul “*Strategi Dakwah Front Pembela Islam (FPI) Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Globalisasi*”. Peneliti bertujuan untuk mengetahui strategi dakwah Front Pembela Islam FPI dalam menanggulangi dampak negatif terhadap globalisasi.<sup>24</sup>

## E. TINJAUAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL.

### 1. Konsep Islamisme dan Radikalisme Islam

Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian. Sementara yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Radikalisme merupakan gerakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dirugikan oleh fenomena sosio-politik dan sosio-historis. Gejala praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok umat

---

<sup>23</sup>Nurotul Badriyah. “*Amar Ma’ruf Nahi Mungkar Dalam Perspektif Front Pembela Islam (FPI) Studi Kasus Di Surabaya*”. Skripsi. Mahasiswa Jurusan Filsafat Politik Islam Fakulta Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Tahun 2013.

<sup>24</sup>Dodiana Kusuma. “*Strategi Dakwah Front Pembela Islam (FPI) Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Globalisasi*”. Skripsi. Mahasiswa Jurusan Komonikasi Dan Penyiaran Islam fakultas Dakwah Dan Komonikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2010.

Islam itu, secara historis-sosiologis, lebih tepat sebagai gejala sosial politik ketimbang gejala keagamaan meskipun mengibarkan panji-panji keagamaan.

Islam adalah agama monoteistik yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an dan Al-Hadits merupakan sumber atau pedoman bagi umat untuk melakukan hubungan-hubungan sosial dan politik. Sehingga, umat Islam dan non muslim pada umumnya mempercayai watak holistic Islam sebagai instrument illahiah untuk memahami dunia. Islam seringkali dipandang lebih dari sekedar agama, untuk itu pandangan tersebut menyatakan bahwa Islam tidak mengakui tembok pemisah antara yang spiritual dan yang temporal, melainkan mengatur semua aspek kehidupan bagi Hasan Hanafi, bahwa term "Islam" yang umum harus dimaknai sebagai "sebuah" agama tertentu. Menurutnya, term ini sebaiknya diganti dengan term "pembebasan" sebagaimana disimbolkan dalam syahadat. Menurutnya, lagi "Islam" berarti pembebasan kesadaran manusia dari kekuatan-kekuatan tiran. Islam memang juga bermakna "penyerahan", tetapi makna tersebut telah dimanipulasi oleh kaum elit menjadi "penyerahan" kepada penguasa sebagai implementasi dari penyerahan kepada Tuhan. Karena itu, Hanafi lebih menekankan pada makna lain dari kata "Islam" yakni protes, oposisi, dan revolusi. Dari pemaknaan tersebut maka Islam banyak dipandang lebih dari sekedar agama, maka, menimbulkan beberapa bentuk aktivisme Islam yang sering disebut Islamisme.

Dalam pandangan lain, Islamisme diartikan sebagai keyakinan bahwa Islam memiliki seperangkat norma atau ajaran yang kompherensif dan unggul yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk ketertiban aturan sosial. Bagaimanapun, istilah

“Islamisme” tidaklah cukup untuk menilai sebuah tipe gerakan, kecuali dengan karakter khusus sebagai berikut :

1. Para pendukungnya percaya bahwa Islam harus diimplementasikan secara tekstual sebagaimana diperintahkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, tanpa kompromi. Mereka percaya bahwa Islam satu-satunya solusi bagi krisis yang melanda umat Islam karena Islam dipercaya sebagai agama yang lengkap, yang dapat diaplikasikan di setiap zaman dan tempat.
2. Mereka cenderung bersikap reaktif terhadap apapun yang mereka anggap sebagai bentuk penyelewengan Islam dan berusaha mengembalikan Islam versi mereka sendiri. Mempunyai sistem kepercayaan berbeda dengan yang lain, beberapa kelompok Islamis-khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok melioris kemungkinan tidak bersikap resisten terhadap status quo. Mereka melihat komunitas muslim yang menyimpang adalah lahan untuk kemudian dikembalikan ke versi Islam yang “otentik” melalui pendekatan persuasif dan damai.

Dengan karakteristik tersebut, maka tidak dapat mendefinisikan secara jelas garis pemisah antara Islamisme damai dan Islamisme radikal.<sup>25</sup>

Di tingkat nasional radikalisme kembali mengemuka di Indonesia pasca orde baru terutama dalam bentuk Islam politik dan juga kelompok gerakan Islam. Namun demikian, selain masa pasca orde baru, sejarah panjang radikalisme

---

<sup>25</sup>Syahrir Karim dan Samsu Adabi Mamat. *Islamisme Dan Demokrasi Di Indonesia Pasca Reformasi : Analisis Sosio-Politik*. Jurnal. Jurusan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2012.

keagamaan di Indonesia dapat pula ditemukan dimasa pemerintahan orde lama dan orde baru. Ada dua alasan yang bisa dikemukakan terkait relasi antara negara dengan kelompok gerakan Islam di Indonesia. Pertama, warisan relasi yang bersifat fluktuatif antara umat Islam dengan negara pasca kemerdekaan dalam bentuk penindasan politik kelompok Islam. Kedua, adanya penindasan ekonomi politik dimana radikalisme mencuat atas dasar respon kelas untuk melawan dominasi modal yang bersifat oligarkis dengan negara.

Istilah “Islam Radikal”, sebagai sebuah kesatuan dari berbagai fenomena sosial dan keagamaan kelompok-kelompok muslim yang sedemikian kompleks, barangkali lebih tepat dipergunakan disini sebagai sebuah titik tolak (*point of departure*) ketimbang sebagai sebuah penjulukan, labelisasi ataupun penyebutan yang mapan dan tidak berubah terhadap fenomena tersebut. Hal ini disebabkan sebuah definisi yang dibuat seperti “Islam Radikal” harus diakui tidak sepenuhnya mampu mendeskripsikan fenomena atas gerakan-gerakan tersebut.

Namun, untuk memudahkan identifikasi masalah ini, istilah “Islam radikal” tetap dipertahankan dengan beberapa penjelasan dan batasan secara spesifik akan dideskripsikan. Secara sederhana yang dimaksud dengan kelompok “Islam Radikal” adalah kelompok yang mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatic yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung.

Dalam kegiatannya mereka seringkali menggunakan aksi-aksi yang keras bahkan tidak menutup kemungkinan kasar terhadap kegiatan kelompok lain yang



dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka. Secara sosio-kultural dan sosio-relegius, kelompok radikal ini mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual mereka yang khas. Kelompok “Islam Radikal” sering kali bergerak secara bergeriliya walaupun banyak juga yang bergerak secara terang-terangan.

Secara umum meminjam terminology Espito, dapat diidentifikasi beberapa landasan ideologis yang dijumpai dalam gerakan-gerakan tersebut, yakni pertama, kelompok-kelompok ini berpendapat bahwa Islam adalah sebuah pandangan hidup yang komprehensif dan bersifat total. Dengan demikian, Islam itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik, hukum, dan masyarakat.

Kedua, mereka sering menganggap ideology dari Barat yang sekuler dan cenderung materialistis harus ditolak. Ketiga, mereka cenderung mengajak pengikutnya untuk kembali kepada Islam sebagai usaha dan perubahan sosial. Keempat, karena mereka beranggapan bahwa ideology dari masyarakat Barat harus digantikan dengan ideology Islam dan menjadikannya sebagai sumber hukum dan harus diterima.

Kelima, mereka berkeyakinan bahwa upaya-upaya Islamisasi pada masyarakat muslim tidak akan berhasil tanpa menekankan aspek pengorganisasian ataupun pembentukan sebuah kelompok yang kuat. Meskipun terkadang berskala

kecil, kelompok yang dibangun biasanya secara ideologis berkarakter kuat, dengan mengandalkan sebagaian kelompok yang terlebih terdidik dan terlatih.<sup>26</sup>

## 2. Teori Gerakan Sosial.

Dalam sosiologi, gerakan sosial dikenal sebagai sosiologi gerakan dimana riset tentang gerakan sosial selalu bertolak dari teori umum tentang masyarakat dimana wujud konkrit dari gerakan sosial adalah perilaku kolektif yang memiliki tujuan dan kepentingan bersama. Secara khusus, gerakan sosial didefinisikan sebagai :

- a. Upaya kolektif untuk membangun tatanan kehidupan yang baru (Blumer).
- b. Upaya kolektif untuk mengubah tatanan sosial (Lang).
- c. Tindakan kolektif berkelanjutan untuk mendorong atau menghambat perubahan dalam masyarakat atau dalam kelompok yang menjadi bagian masyarakat itu (Turner dan Killian).

Dari definisi di atas, dapat ditarik unsur-unsur gerakan sosial yaitu

1. Adanya kolektifitas orang yang bertindak.
2. Tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu.
3. Tindakannya memiliki derajat spontanitas yang relative tinggi.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Jajang Jahroni, dan Janhari. *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*.(PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.2004.) h.2-6

<sup>27</sup>Muh. Irfan Idris. *Sosiologi Politik*. ( CV. Berkah Utami. Makassar. 2010.) h.142-143.

### A. Tipe Gerakan Sosial.

Gerakan sosial muncul dalam segala bentuk dan ukuran. Untuk memahami berbagai jenis fenomena ini di perlukan sebuah tipologi yang menggunakan beberapa kreteria seperti berikut.

1. Gerakan sosial yang berbeda menurut bidang perubahan yang di inginkan. Ada yang terbatas tujuannya hanya untuk mengubah aspek tertentu kehidupan masyarakat tanpa menyentuh inti struktur institusinya, gerakan yang hanya menginginkan perubahan di dalam ketimbang perubahan masyarakatnya sebagai keseluruhan. Ini di sebut *gerakan reformasi*.
2. Gerakan sosial yang berbeda dalam kualitas perubahan yang di inginkan. Ada gerakan yang menekankan pada inovasi, berjuang untuk memperkenalkan institusi baru, bentuk kehidupan baru, dan keyakinan baru. Orientasi gerakan ini adalah ke masa depan dan gerakan ini di sebut *gerakan progresif*.<sup>28</sup>
3. Gerakan yang berbeda dalam target perubahan dalam target perubahan yang di inginkan. Ada memusatkan perhatian pada perubahan struktur sosial dan ada pada perubahan individual. Gerakan perubahan structural dalam bentuk gerakan sosial politik yang berupaya mengubah stratifikasi politik, ekonomi, dan kelas.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Pioter Sztompaka. *Sosiologi Perubahan Sosial*. (Prenada Media Grup. Jakarta. 2011.) h.332-333.

<sup>29</sup> Muh. Irfan Idris. *Sosiologi Politik*. (CV. Berkah Utami. Makassar. 2010.) h.146.

4. Gerakan sosial yang berbeda mengenai arah perubahan yang di inginkan. Kebanyakan gerakan mempunyai arah positif. Gerakan seperti itu mencoba memperkenalkan perubahan tertentu, membuat perbedaan.
5. Gerakan sosial yang berbeda dalam strategi yang melandasi atau logika tindakan mereka. Ada yang mengikuti logika instrumental gerakan seperti ini berjuang untuk mendapatkan kekuasaan politik dan dengan kekuatan politik itu memaksakan perubahan yang di inginkan dalam peraturan hukum, institusi, dan organisasi masyarakat. Tujuan utama mereka adalah control politik.<sup>30</sup>

Gambaran aktifitas gerakan sosial dapat berbeda antara berbagai masyarakat termaksud intensitasnya. Hal ini dapat di lihat pola intensitas perubahan politik yang bisa saja terjadi secara rutin yang di barengi dengan kekacauan yang bersifat total.

Teori gerakan sosial di atas dapat dipergunakan untuk menjelaskan fenomena gerakan sosial secara umum, termasuk gerakan sosial Islam. Kendati demikian bagian tertentu gerakan sosial Islam memiliki kekhasan yang tidak sepenuhnya sama dengan gerakan sosial pada umumnya. Berikut adalah beberapa analisis gerakan sosial yang dibuat untuk memahami gerakan Islam Syariah yang menjamur di Indonesia.

---

<sup>30</sup> Pieter Sztompka. *Sosiologi Perubahan Sosial*. (Prenada Media Grup. Jakarta. 2011.) h. 335.

1. Analisis “prilaku kolektif” menurut teori ini, bahwa suatu pergolakan atau gerakan sosial terjadi karena adanya, mobilisasi atas dasar *belief* seperti prilaku tak terlembaga, revivalisme agama, pemberontakan, dan revolusi.
2. Analisis ketegangan structural. Suatu gerakan sosial terjadi di tandai dengan adanya kemarahan dan keputusan yang melahirkan gerakan emosional yang sedemikian rupa yang disebabkan oleh adanya ketegangan sosial pada level makro masyarakat.
3. Analisis mobilisasi structural. Analisis ini menekankan pada tindakan-tindakan yang pada umumnya rasional yang dilakukan pengikut-pengikut gerakan sosial untuk membuat gerakannya berhasil.
4. Analisis kulturalisme. Gerakan sosial ini di analisis dengan memaknai tindakan sosial anggotanya dan gerakan sosial dapat di analisis dengan pendekatan proses kebudayaan , dalam hal ini gerakan sosial tidak hanya berkaitan dengan dimensi ideology gerakan semata tetapi juga sistem kepercayaan yang melekat kuat dalam kehidupan kemasyarakatan.<sup>31</sup>

## **B. Teori-teori Gerakan sosial.**

### **1. Teori Prilaku kolektif**

Teori ini berpijak pada pendekatan psikologi sosial. Konsep-konsep yang berhubungan dengan teori ini yaitu ketegangan (*strain*), stres (*stress*), massa (*mass society*), emosi (*emotion*) ketidakrasional (*irrationality*), penularan perasaan (*contagion*), keterasingan (*alienation*), frustrasi (*frustration*). Penekananan konsep

---

<sup>31</sup>Wahyuni. *Gerakan Sosial Islam*. Alauddin University Press. Makassar. 2014. h. 23-24.

tersebut sehingga menjadikan individu sebagai pusat dari analisis teori perilaku kolektif.

## **2. Teori Mobilisasi Sumber Daya.**

Teori ini melakukan pendekatan sumber daya berangkat dari asumsi bahwa gerakan sosial merupakan sejumlah aksi kolektif rasional yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tersingkir untuk menyatakan kepentingan mereka. Teoritis mobilisasi ini menolak penekanan pada peran perasaan dan penderitaan dan pemanfaatan kategori psikologis-psikologis dalam menjelaskan gerakan sosial dan mereka menolak pendekatan karakteristik gangguan mental dari perilaku kolektif. Teori ini memusatkan pada rasionalisme dan materialisme.

## **3. Teori Berorientasi Identitas.**

Teori berorientasi identitas tentang gerakan sosial kontemporer menyuarakan asumsi dasarnya kritik terhadap teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Teori ini bersifat non materialistic dan ekspresif ia mengurai pertanyaan seputar integritas dan solidaritas kelompok yang terlibat aksi kolektif. Teori ini mengandaikan adanya ruang artikulasi yang didasarkan pada nilai-nilai solidaritas yang terbangun dari proses integritas kultural melalui aksi-aksi kolektif warga. Apa yang menjadi pokok pemikiran disini berkaitan erat dengan aksi atau perilaku kolektif yang didasarkan pada kenyataan sosial yang menyimpang.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Wahyuni. *Gerakan Sosial Islam*. (Alauddin University Press. Makassar. 2014.) h.33-42.



## **F. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, karena pendekatan ini dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara mendetail. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji, membuka, menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya. Baik bentuk kata-kata maupun bahasa serta bertujuan untuk memahami fenomena dan temuan-temuan yang di temukan ataupun yang terjadi di lapangan berdasarkan bukti atau fakta sosial yang ada misalnya prilaku, tindakan, dan persepsi.

Seperti dalam pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah alat untuk memaparkan dan memahami makna yang berasal dari individu dan kelompok mengenai masalah sosial atau masalah individu.<sup>33</sup> Penelitian ini apabila diterapkan dalam penelitian tentang “Konstruksi Gerakan Politik Front Pembela Islam (FPI) Di Kota Makassar” adalah mencoba memahami bagaimana konstruksi gerakan politik FPI dan korelasinya dengan proses demokrasi di Kota Makassar.

### **B. Metode Pengumpulan Data.**

1. *Library research* yaitu cara pengumpulan data dengan melalui penelusuran buku, jurnal, surat kabar atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>John W. Creswell. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. (PT Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2012.) h.5.

<sup>34</sup>John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009 ), h.4

- (a) Kutipan langsung yaitu penulis mengutip isi buku yang relevan dengan materi penulisan dengan tidak mengubah redaksi baik huruf maupun tanda bacanya.
- (b) Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengutip hasil bacaan dengan berbeda konsep aslinya, namun tidak merubah makna dan tujuan dalam bentuk ikhtisarnya.

2. *Field research* yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung kepada objek penelitian yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tiga cara yakni wawancara, observasi dan dokumenter :

#### 1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya.<sup>35</sup> Peneliti langsung turun ke lapangan untuk mewawancarai pihak-pihak yang dapat memberikan informasi atau sumber data yang di butuhkan peneliti sehingga dapat memperoleh informasi mengenai “Konstruksi Gerakan Politik FPI Di Kota Makassar” yang dilakukan pihak Laskar FPI.

#### 2. Teknik Observasi-Partisipatif

---

<sup>35</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods)*. Alfabeta. Bandung. 2014. h.188.

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan langsung tanpa menggunakan alat standar lain untuk keperluan penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah sasaran yang akan diteliti cukup memenuhi kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian ini, sekaligus untuk mengetahui keabsahan data yang di peroleh dari informan dan responden.

### 3. Teknik dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau flim audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya.<sup>37</sup> Yang di mana peneliti mencari data tentang hal- hal yang dibutuhkan peneliti untuk menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan “Konstruksi Gerakan Islam FPI Di Kota Makassar”

## C. Sumber data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran tentang objek penelitian adapun sumber data yang digunakan yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data pokok dalam penelitian. Dalam penelitian peneliti membutuhkan data untuk membuktikan fakta dilapangan. Data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Peneliti turun langsung ke masyarakat umum

<sup>36</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods)*.(Alfabeta. Bandung. 2014). h. 309.

<sup>37</sup>Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (CV Alfabeta. Bandung. 2014.). h.82.

untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Dari proses wawancara dengan berbagai sumber peneliti mendapatkan data-data seperti, bagaimana konstruksi gerakan politik FPI dan korelasinya dengan proses demokrasi di kota Makassar

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penunjang penelitian. Dalam penelitian peneliti juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

### **D. Analisis Data.**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi ataupun pengumpulan bahan informasi cetak. Metode yang di gunakan adalah metode deduktif.

## 1. Letak Geografis

*Sumber: Badan Statistik Kota Makassar*

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Makassar bahwa jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Panakukkang, Manggala dan Biringkanaya. Sedangkan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

### 1. Penduduk

Penduduk Kota Makassar umumnya beretnis mayoritas beragama islam. Makassar merupakan kota yang multi etnis. Penduduk Makassar kebanyakan dari (Suku Makassar) dan Suku Bugis sisanya berasal dari suku Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya. Ada pun jumlah penduduk di Kota Makassar, berdasarkan Badan Statistik Kota Makassar 2011-2013 di bawah ini;

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Perempuan Dan Laki-Laki**  
**2012-2013**

Kecamatan	2012		2013	
	Laki-laki	perempuan	Laki-laki	Perempuan
Mariso	28.165	28.359	28.333	28.245
Mamajang	28.892	30.278	28.405	29.682
Tamalate	87.551	89.396	90.595	92.344
Rappocin	74.811	79.373	75.948	80.717
Makassar	40.400	41.672	40.056	40.998
Ujung Pandang	12.829	14.372	12.498	13.988
Wajo	14.410	15.220	13.453	14.103

Bontoala	26.580	27.935	25.667	26.964
Ujung Tanah	23.597	23.532	23.519	23.317
Tallo	67.504	67.279	69.327	69.092
Panakukkang	70.439	71.869	71.749	73.248
Manggala	61.386	61.453	65.512	65.431
Biring kanaya	88.297	88.819	97.410	98.496
Tamalanrea	51.882	53.352	53.623	55.361
<b>Jumlah</b>	<b>676.744</b>	<b>692.862</b>	<b>696.086</b>	<b>711.986</b>

*Sumber: Badan Statistik Kota Makassar*

Data diatas berisi mengenai data jumlah rumah tangga berdasarkan bukti kepemilikan rumah per kecamatan Mariso sampai Kecamatan Tamanlarea yang terdiri dari 143 kelurahan di Kota Makassar tahun 2012-2013 yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Dan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar 1.369.606 jiwa sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 1.408.072 jiwa. Kota Makassar juga memiliki tingkat pendidikan seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar dan Universitas Islam Negeri Alauddin. Ini membuktikan bahwa Kota Makassar setara dengan kota-kota besar di Indonesia.

## 2. Budaya

Kota Makassar memiliki adat-istiadat yang cukup beragam salah satunya dalam bentuk bahasa yang digunakan sehari-hari yaitu bahasa bugis Makassar. Bugis merupakan kelompok etnik dengan wilayah asal Sulawesi Selatan. Bahasa bugis yang tersebar di Kabupaten Maros, Takalar, Jeneponto, Luwu, Bone,

Majene, Pare-pare, Sidrap, Wajo dan sebagainya. Dan nama panggilan gelar bugis juga berbeda-beda seperti Daeng, Puang, Karaeng dan lainnya. Kota Makassar sendiri biasa menggunakan gelar tersebut dengan sebutan “Daeng”. Budaya bugis ini berasal dalam lontara. Begitulah budaya Kota Makassar hingga sampai saat ini.

### **3. Perekonomian**

Perekonomian Kota Makassar sangat maju dibandingkan kabupaten atau kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dikarenakan bahwa Kota Makassar adalah terletak paling strategis dari kota lain dan juga pusat perdagangan terbesar di Sulawesi Selatan. Misalnya, memiliki pasar daerah yang banyak, toko-toko modern dan lain sebagainya.

Dari sisi kelautan Kota Makassar mempunyai pelabuhan dimana hasil-hasil laut dikelola seperti ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan dan kapal-kapal yang berasal dari Jawa membawa barang untuk diperdagangkan di Kota Makassar, sedangkan dari sisi udara terdapat pesawat yang membawa dagangan dari beberapa pulau dan negara-negara tetangga.

Makassar juga memiliki beberapa pabrik-pabrik, yakni pabrik minuman dan makanan ringan. Salah satu contohnya pabrik minuman markisa, pabrik roti, pabrik tahu dan tempe dan lain sebagainya. Penduduk Kota Makassar yang sangat padat membuat penduduk dari kota atau kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan menjual beberapa hasil pangan, beras dan buah-buahan.



## **b. Gambaran umum tentang Front Pembela Islam (FPI)**

Pada dasarnya, mendirikan pemerintah Islam merupakan suatu kebutuhan Islami dan insani yang akan menyuguhkan kepada manusia contoh hidup tentang kesatuan agama dan dunia, kemanggulan moral dan materil, serta keseresaian antara kemajuan peradaban dengan keluruhan moral. Dengan demikian fungsi dari pemerintahan Islam adalah untuk melestariakan dan mengembang ajaran Islam, menjadikan Islam sebagai akidah dan sistem, ibadah dan moral, serta sebagai nilai-nilai kehidupan dan peradaban.<sup>38</sup> Menurut Al- Mawardi, secara garis besar tugas dan tujuan pemerintahan islam adalah melaksanakan sepenuhnya syariah Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menjaga tegaknya agama dan mengangani seluruh masalah kehidupan.

Memasuki tahun 1980-an, wacana pemikiran Islam di Indonesia mengalami perkembangan signifikan. Indikator untuk membuktikan hal tersebut adalah munculnya karya-karya pemikiran dan penerbitan buku-buku keislaman di Indonesia. Indikator lain adalah lahirnya pemikir-pemikir muslim Indonesia yang secara kuantitas juga teras kualitas pada beberapa segmen semakin bertambah. Indikator terakhir adalah maraknya gerakan, komonitas, jamaah atau kelompok keislaman. Lahirnya gerakan-gerakan ini sebagai konsekuensi logis dari adanya perkembangan wacana keilmuan Islam yang menimbulkan gesekan dielektika intelektual dan pada akhirnya mengarah pada terbentuknya pola pemikiran yang khas, distinkif bahkan berimplikasi pada terwujudnya kelompok-kelompok atau jamaah tersebut.

---

<sup>38</sup>A. Hasjmi. *Dimana Letaknya Negara Islam*. (PT. Bina Ilmu. Surabaya. 1984.) h. 84.

Islam adalah solusi yang tidak memisahkan agama dengan kehidupan dunia, menyinari akal dan hati, membangun masjid di pabrik, dan meninggikan menara masjid. Dengan ini, hidup lebih sempurna dan penuh dengan keseimbangan. Antara jasmani dan rohani yang berjalan beriringan, antara ekonomi dan ibadah saling melengkapi, dunia dan akhirat saling terkait

Munculnya gagasan tentang penerapan syariat Islam di Indonesia bertepatan dengan runtuhnya era Orde Baru dan di lanjutkan dengan era Reformasi, yang terus-menerus meluas hingga ke berbagai daerah dan merasuki berbagai bidang kehidupan masyarakat. Cita-cita ideologis penerapan syariat Islam secara formal dalam konteks bernegara yang selama ini terpendam dalam hati nurani sebagian umat Islam, seakan mendapat angin segar dengan lahirnya demokratisasi di Indonesia. Kegagalan memperjuangkan penegakan syariat Islam melalui amandemen Undang-undang Dasar 1945 dan dilegalkannya undang-undang tentang otonomi daerah adalah faktor utama yang mendorong munculnya perjuangan untuk mewujudkan daerah otonomi khusus syariat Islam.

Sepanjang perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia khususnya di kota Makassar, ada beberapa upaya yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu dari masyarakat muslim untuk mendirikan negara Islam yang mengimplementasikan syariat Islam. Gerakan-gerakan seperti itu tidak jarang berupaya mencapai tujuannya dengan melakukan pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah atau menggunakan cara-cara kekerasan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Taufik Adnan Amal. *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*. ( Pustaka Alvabet. Jakarta. 2004.) h.65.

Syariat Islam adalah solusi massif, dan merupakan jargon-jargon yang menyemangati gerakan mereka. Andri Rosadi mengidentifikasi bahwa organisasi ini adalah: Kelompok Tarbiyah, yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jundullah (Sulawesi Selatan), dan Front Pembela Islam (FPI).

Merealisasikan jargon solusi Islam, yang diharapkan dapat membangun tatanan masyarakat Islam, menegakkan hukum Islam, serta memulai hidup secara Islami tidak bisa dilakukan hanya melalui keputusan-keputusan pejabat pemerintahan, revolusi, atau dengan tutunan dan petunjuk sekalipun. Akan tetapi adanya pemicu awal untuk perubahan tersebut merupakan suatu kemestian, yakni suatu gerakan penyadaran (gerakan dakwah) yang komprehensif, yang akan memicu dan mempersiapkan para pelaku pergerakan.

Sebagai bukti empiris, Daulah Sanusiah bisa berdiri karena didahului oleh gerakan dakwah dan penghidupan kembali nilai-nilai Islam, serta adanya gerakan pembaharuan. Berdirinya Daulah Saudi pun didahului oleh gerakan dakwah atau dikenal dengan gerakan Wahabiyah. Demikian pula daulah-daulah yang lain, berdiri di fondasi pemikiran dan ideologi yang kuat

Dengan kata lain, solusi Islam harus didahului dengan praktikan ajaran Islam, Praktik ajaran Islam yang diharapkan pun mesti menggambarkan kerja sama (*al-amal al-jama'i*) yang ditopang oleh asas keteraturan dan strategi gerakan yang mantap sehingga dapat memetik hasil dan harapan yang sempurna<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Yusuf Al- Qaradhawi. *Konsep Islam Solusi Utama Bagi Umat*. (Senayan Abadi Publishing. Jakarta Selatan. 2004.) h.166.

Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah organisasi massa Islam bergaris keras yang berpusat di Jakarta. Selain beberapa kelompok internal, yang disebut oleh FPI sebagai *sayap juang*, FPI memiliki kelompok Laskar Pembela Islam, kelompok paramiliter dari organisasi tersebut yang kontroversial karena melakukan aksi-aksi "penertiban" (*sweeping*) terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam terutama pada bulan Ramadhan dan seringkali berujung pada kekerasan.

Menurut pendapat ketua FPI Habieb Rizieq Persfektief FPI adalah posisi FPI menjadi semacam Pressure Group di Indonesia, untuk mendorong berbagai unsur pengelola Negara agar berperan aktif dalam memperbaiki dan mencegah kerusakan moral dan akidah umat Islam, serta berinisiatif membangun suatu tatanan sosial, politik dan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Penerapan syariat Islam yang di dukung FPI bukan berarti mengganti dasar negara dan bentuk negara. FPI menganggap bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah fainal. Yang di persoalkan FPI adalah adanya hukum syariat Islam yang sudah baku sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Syariat Islam memberikan bagian dari zakat untuk orang yang berhati besar, yang memberikan harta mereka untuk proses perdamaian antara dua pihak, baik individu maupun kelompok. Mereka diberikan bagian dari zakat dengan status pembayaran utang kepada mereka. Hal ini ditujukan untuk mendorong mereka, dan yang lain, agar selalu berupaya mendamaikan pihak-pihaknya yang berselisih

Jika solusi ini adalah solusi yang diterima oleh umat dengan kerelaan, maka tidaklah mengherankan jika solusi tersebut dibela oleh umat Islam dan

diperjuangkan dengan serius serta penuh pengorbanan. Mereka juga mempertahankan solusi itu dari siapa saja yang berupaya memusuhinya. Namun jika solusi Islam diterapkan karena raja atau kepala negara, untuk memperkuat kekuasaannya dan mempertahankan pemerintahannya, atau demi prinsip yang diimpor dari Timur atau Barat, maka rakyatlah akan marah.

Front Pembela Islam merupakan salah satu organisasi-organisasi Islam yang cukup penting pasca masa reformasi Indonesia. FPI lahir bersamaan dengan naiknya Habibie menjadi presiden setelah presiden Soeharto mengundurkan diri. FPI didirikan tepat pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-53, tanggal 17 Agustus 1998. Bertempat di Pesantren Al- Umm Ciputat Jakarta Selatan pimpinan K.H. Misbahul Anam, yang dideklarasikan oleh Habib Muhammad Rizeq Syihab. Dengan Visi dan Misi menegaskan “Amar Ma’ruf Nahi Mungkar”<sup>41</sup>

### **1. Muhammad Habib Rizieq Sang Pendiri**

Nama lengkapnya adalah Habib Muhammad Rizieq, ibn Husein Shihab. Lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1965, Habib Rizieq demikian ia biasa di panggil berasal dari keluarga Arab yang aktif dalam pergerakannya. Ayahnya, Sayyid Husein. Tumbuh dilingkungan keluarga Arab, Rizqie sejak awal akrab dengan pendidikan agama Islam.

Disamping memasuki sekolah formal, sebagaimana layaknya masyarakat Indonesia. Orang tua Rizqieq senantiasa menekankan pentingnya agama dalam segala kehidupan. Oleh karena itu, selepas SMU Rizqieq diharapkan, dan

---

<sup>41</sup>Jajang Jahroni Dan Jamhari. *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*. (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.) h.23.

memenuhinya, melanjutkan pendidikan di Timur Tengah, setelah beberapa tahun belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam lainnya di LPIA, Rizqieq akhirnya bisa melanjutkan pendidikannya di Arab Saudi.

Demikian Rizqieq kemudian melanjutkan sekolahnya di jenjang SI di King Saud University, Riyadh, Arab Saudi pada jurusan hukum Islam. Rizqieq berhasil menyelesaikan studinya pada pertengahan 1990. Setelah menamatkan pendidikannya, ia mengajar di sebuah SLA di Riyadh yang dijalannya selama satu tahun, pada 1992, ia pulang ke Indonesia.

Sepulangnya dari Arab Saudi, Rizqieq aktif mengisi pengajian di Jakarta dan sekitarnya. Kegiatan tersebut dilakukan selama satu tahun kemudian pada pertengahan 1993, ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi kejenjang S2 di Universitas Antar Bangsa Malaysia. Namun, setelah belajar selama satu semester, ia memutuskan kembali ke Tanah Air dan meneruskan kegiatan dakwahnya sampai sekarang ini.

Kita memang tidak bisa menunjukkan bukti adanya hubungan langsung antara latar belakang pendidikan dan kegiatan keagamaan Rizqieq dengan corak keagamaan garis keras Front Pembela Islam (FPI). Hal ini bisa dijelaskan adalah bahwa kegiatan dakwah yang dilakukannya sepulang dari Timur Tengah semakin membuatnya bersentuhan dengan perseolan-perseolan sosial masyarakat secara lebih intensif. Dan hal inilah yang kemudian mendorongnya untuk semakin jauh terlibat dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut.<sup>42</sup>

## **2. Latar belakang sejarah terbentuknya FPI (Front Pembela Islam).**

---

<sup>42</sup>Jajang Jahroni dan Jamhari. *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*.(PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.2004). h.10

Ketika terjadinya proses reformasi, hampir tidak ada kekuatan sosial dominan yang bisa mengendalikan gerakan masyarakat. Bahkan aparat negara juga tidak memiliki peran yang efektif untuk menjalankan fungsinya sebagai penjaga ketertiban sosial masyarakat. Yang terjadi adalah munculnya anarki sosial, yang di tandai dengan maraknya kerusuhan di berbagai lapisan masyarakat. Setiap elemen masyarakat pada saat itu memiliki kesempatan untuk melakukan konsolidasi, membentuk kelompok-kelompok sosial guna mengekspresikan kepentingan masing-masing.

Selain alasan tersebut, bangkitnya kekuatan Islam jenis ini juga di dorong oleh suatu keinginan untuk menjaga dan mempertahankan martabat islam dan sekaligus umat islam. Umat islam tampaknya selalu bernasib kurang baik, selalu menjadi korban dari tatanan sosial yang ada, maka untuk menjaga martabak dan wibawa islam, kelompok ini memandang perlu melakukan konsolidasi kekuatan islam guna membela umat islam yang di serang oleh kelompok lain. Atas dasar ini, lahirlah laskar-laskar islam. laskar-laskar ini banyak melakukan pelatihan kemiliteran untuk memberi perlindungan kepada umat islam di daerah-daerah konflik untuk memberantas kemaksiatan.

Front Pembela Islam (FPI) lahir di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1998 yang didirikan oleh Muhammad Habib Rizieq di Pesantren Al-Umm Ciputat, Tangerang. sejarah masuknya Front Pembela Islam (FPI) di Kota Makassar yaitu tepatnya pada tahun 2005 yang dibawa oleh Habib Machmud bin umar alhamid. Pertemuan awal dan deklarasinya di kompleks Unhas lama Jl. Sunu, Kota

Makassar yang dihadiri ketua umum dewan pimpinan pusat (DPP) Front Pembela Islam (FPI) Habib M. Rizieq Shihab dan beberapa tanfidzi DPP FPI.

Front Pembela Islam (FPI) sendiri lahir di Kota Makassar pada tahun 2010 untuk ketua DPD Front Pembela Islam (FPI) Sulawesi Selatan di amanahkan kepada Habib M. Reza Alhamid yang dideklarasikan 2010 di Mesjid Al-Marqas As-Islami oleh ketua umum Muhammad Rizieq Shihab (Dewan Pimpinan Pusat). Namun, tak lama kemudia terjadi pengalihan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Pergantian itu dilakukan setelah musyawarah di mana adanya ketidaknyambungan antara ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan anggota Front Pembela Islam, para anggota menganggap bahwa ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang dipegang oleh Habib M. Reza Alhamid ini sangat dekat dengan umaro (pemerintah). Front Pembela Islam (FPI) dijadikan ajang bisnis sehingga dari alasan tersebut ketua Dewan Pimpinan Daerah di alihkan kepada Habib Muchin bin Djafar Al-hasby.

Dari gambaran tentang adanya pergantian pimpinan yang disebabkan kedekatannya dengan umaro" (pemerintah) tersebut diatas, nampak jelas bahwa FPI sebagai sebuah Ormas memosisikan diri sebagai organisasi yang enggan berselingkuh dengan kekuasaan (pemerintah). Dalam artian, FPI sebagai sebuah Ormas hadir sebagai pengontrol kinerja Pemerintah.

Pemilihan nama "Front Pembela Islam" ini memiliki makna tersendiri. Kata "front" menunjukkan bahwa organisasi ini selalu berusaha untuk berada di garis depan dan memiliki sikap tegas dalam setiap langkah perjuangan. Kata "pembela"



mengisyaratkan bahwa organisasi ini akan berperan aktif dalam membela dan memperjuangkan hak islam dan umat muslim. Sementara kata “islam” mencirikan bahwa perjuangan organisasi tidak terlepas dari ikatan ajaran islam yang lurus dan benar. Dengan nama Front Pembela Islam, organisasi ini membela “nilai dan ajaran”, bukan orang atau kelompok tertentu.<sup>43</sup>

Front Pembela Islam (FPI) didirikan sebagai respon terhadap kondisi sosial-politik Indonesia, yang tidak berpihak kepada kepentingan umat Islam. Di dalam situs resminya fpi.or.id, FPI menyebutkan bahwa keberadaanya dalam ruang publik Indonesia adalah sebagai “ Pressure Grup di Indonesia, untuk mendorong berbagai unsur pengelola negara agar berperan aktif dalam memperbaiki dan mencegah kerusakan moral dan aqidah umat Islam, serta berinisiatif membangun suatu tatanan sosial, politik, dan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai *syari’at* Islam”.

### 3. Gambaran Umum visi dan misi DPD Front Pembela Islam (FPI).

Sesuai dengan latar belakang pendiriannya, maka FPI mempunyai sudut pandang yang menjadi kerangka berfikir organisasi ( visi ), bahwa penegakan amar ma’ruf nahi munkar adalah satu-satunya solusi untuk menjauh-kan kezholiman dan kemunkaran. Tanpa penegakan amar ma’ruf nahi munkar, mustahil kezholiman dan kemunkaran akan sirna dari kehidupan umat manusia di dunia.

---

<sup>43</sup>Jamhari dan Jajang Jahroni. *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*. (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.2004).h.132-133.

Dalam penegakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam versi FPI maka dalam mendefenisikan Ma'ruf dan Mungka lebih ringkasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

<b>Mendefenisikan Ma'ruf dan Mungkar Kategori Ma'ruf</b>	<b>Kategori Mungkar</b>
Mewujudkan keadilan sosial	Ketidakadilan sosial
Memberantas minuman keras	Minuman keras
Memberantas pelacuran	Pelacuran
Memberantas pornografi	Pornografi
Memberantas perjudian	Perjudian
Memberantas narkoba	Narkoba
Menolak praktik perdukunan	Praktik pendukunan
Memberantas premanisme	Fitnah
Menghukum para koruptor	Premanisme
Mencegah pemurtadan	Korupsi
Mencegah penyimpangan aqidah	Permurtadan
Peduli pada agama	Penyimpangan aqidah
Solider pada nasib umat islam	Pelecahan agama
Aplikasi syariat islam	Tak peduli pada agama
Menolak komunisme	Tak peduli pada nasib umat islam
Menentang zionisme	islam
Negara islam	Penolakan pada nasib umat islam
Aplikasi ekonomi islam	islam

Menolak sekularisme	Komunisme
Menolak pluralism	Zionisme
Memilih partai islam	Nation state
Menyeru pada kebaikan	Sistem ekonomi
Bakti sosial	sosialis/kapitalis
	Sekularisme
	Pluralism
	Penculikan aktivis FPI
	Memilih partai non-Islam

Banyaknya kemaksiatan berupa miras, narkoba, perjudian, dan pelacuran, danm banyaknya tempat maksiat, baik yang terselubung maupun yang terang-terangan di Makassar membuat Front Pembela Islam (FPI) berusaha keras agar UU Anti Maksiat segera terwujud. Dalam usulan tersebut juga disebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan.

Defenisi maksiat harus disesuaikan dengan apa yang berlaku dalam ajaran agama, maksiat yang perlu dibahas mencakup miras, narkoba, perjudian, dan pelacuran, cakupan peraturan tidak terbatas pada maksiat saja, tetapi juga mencakup segala hal yang bisa menjadi pengantar kepada kemaksiatan. Sebagai langkah awal seetidaknya peraturan harus mencakup :

- a. Tempat yang secara terang-terangan menjadi tempat kemaksiatan harus ditutup.

- b. Semua tempat yang diduga menjadi tempat maksiat harus ditutup setiap hari besar Islam.

Front Pembela Islam juga mengusulkan undang-undang Anti Maksiat yang ditujukan untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintahan pusat.

- a. Dalam menegakkan amar ma'ruf FPI mengutamakan metode lemah-lembut dengan langkah :

- 1) Mengajak dengan hikmah (ilmu dan amal)
- 2) Memberi *Mau'izhoh Hasanah*
- 3) Berdiskusi dengan cara yang terbaik,

- b. Dalam menegakkan nahi mungkar FPI mengutamakan metode tegas dengan langkah:

- 1) Menggunakan kekuatan/kekuasaan bila mampu
- 2) Bila langkah pertama tidak mampu, menggunakan lisan dan pena
- 3) Bila kedua langkah tadi tidak mampu, menggunakan hati yang tertuang dalam ketegasan sikap.<sup>44</sup>

Dari uraian metode yang digunakan oleh FPI di atas sebagai upaya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, pada dasarnya nampak mencerminkan kecilnya peluang untuk terjadinya tindakan anarkis di dalam gerakannya. Hal ini semakin meyakinkan jika mencermati prosedur juang/aksi FPI dalam penegakkan nahi mungkar yang terdiri atas 10 langkah, yakni:

---

<sup>44</sup>Pasal 7 Anggaran Dasar Front Pembela Islam.

1. laporan masuk. Laporan masuk disini sebagai informasi awal adanya kemungkaran di lingkungan sosial kemasyarakatan. Laporan masuk ini terbagi atas dua, yakni laporan aktif yang datanganya dari anggota, secara resmi tertulis dan laporan pasif yang datanganya dari masyarakat, secara resmi tertulis.
2. Investigasi. Investigasi ini merupakan langkah selanjutnya setelah adanya informasi. Dalam melakukan investigasi, FPI mencari fakta dan menghimpun data untuk dijadikan bukti awal adanya pelanggaran hukum.
3. Pemetaan wilayah juang. Pemetaan wilayah juang ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh FPI dalam membedakan wilayah kemaksiatan yang didukung oleh masyarakatnya dan wilayah kemaksiatan yang ditolak masyarakatnya.
4. Laporan keluar. Laporan keluar ini merupakan tindak lanjut dari tahapan aksi FPI. Laporan keluar ini berupa penyampaian adanya kemaksiatan/adanya pelanggaran hukum yang ditujukan kepada ulama (tokoh Islam, Ormas Islam, dan Parpol Islam setempat) serta kepada umara/pemerintah (pejabat sipil, TNI dan POLRI, wakil rakyat setempat).
5. Dialog. Dialog ini dilakukan oleh FPI dengan ulama dan umara (pemerintah)
6. Demo. Langkah selanjutnya adalah melakukan demo/aksi dengan titik sasaran adalah tempat maksiat yang jadi penyakit masyarakat.
7. Ultimatum. Ultimatum atau peringatan ini disampaikan kepada pemerintah (pejabat setempat yang berkuasa dan berwenang) dan targetnya adalah tempat maksiat yang jadi penyakit masyarakat.

8. Inisiatif. Inisiatif ini terdiri atas tiga, pertama adalah melalui proses hukum, kedua adalah melalui lobi politik dan ketiga adalah aksi (melalui ruang public).
9. Resiko.
10. Evaluasi.

Selain apa yang dijelaskan di atas, di dalam internal FPI sebagaimana yang dimuat di dalam Buku Panduan Diklat Khusus FPI, terdapat larangan aksi FPI.

Larangan tersebut menyangkut:

1. Dilarang melanggar hukum agama dan hukum Negara.
2. Dilarang melakukan pelecehan, penganiayaan, pengrusakan, penjarahan, dan pembunuhan.
3. Dilarang membawa/menggunakan senjata tajam/api dan bahan bakar/peledak.
4. Dilarang melindungi, membela, member, meminta dan menerima bantuan apa pun dari tempat ma'siat atau pengusahanya.
5. Dilarang melakukan aksi apa pun tanpa mengikuti prosedur standar aksi FPI.

FPI bermaksud menegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara káffah di segenap sektor kehidupan, dengan tujuan menciptakan umat sholihat yang hidup dalam baldah thoyyibah dengan limpahan keberkahan dan keridhoan Allah 'Azza wa Jalla.

Bagi FPI untuk menjadi umat yang terbaik, kaum muslim harus menjalankan *amar ma'ruf nahi mungkar* (menyeruh kebaikan dan mencegah kemungkaran). dan menjadikan *syari'at* Islam sebagai dasar hukum dalam setiap aspek kehidupan. Jadi jika dipandang dari segi orientasi gerakan FPI, pada dasarnya FPI hendak mewujudkan umat terbaik dengan jalan menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* di semua aspek kehidupan dengan berlandaskan *syari'at Islam*.

#### **4. Struktur kepengurusan Front Pembela Islam (FPI).**

Struktur organisasi FPI terbagi atas tiga, struktur utama, pusat, daerah, dan struktur pos komando. Struktur utama mempunyai dua jalur : Majelis Syura dewan tertinggi FPI dan Badan Pengurus sebagai pelaksana program FPI. Struktur organisasi yang baku yang berlaku dari tingkat pusat dan daerah adalah sebagai berikut. FPI di pimpin oleh seorang ketua umum yang dibantu tiga orang ketua. FPI memiliki seorang sekretaris jendral dan seorang bendahara ahli. Dalam struktur organisasi di pusat maupun di daerah, dewan tertinggi Front adalah Majelis Syura. Majelis Syura dipimpin seorang ketua, lima wakil ketua, dan seorang sekretaris. Majelis Syura memiliki lima dewan tinggi, yaitu Dewan Syariat, Dewan kehormatan, Dewan Pembina, Dewan penasihat, dan Dewan Pengawas

Untuk melaksanakan tugasnya, ketua umum dibantu oleh kepala departemen yang berjumlah 12 yaitu Departemen Agama, Departemen Luar Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Bela Negara dan Jihad, Departemen Sospol dan Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Ekuin, Departemen Ristek, Departemen Pangan,

Departemen Kesra, Departemen Penerangan, dan Departemen Kewanitaan. Sementara struktur komando berada di tingkat kelurahan. Unit ini memiliki struktur yang sederhana, yaitu seorang komandan, dan seorang wakil komandan, seorang sekertaris dan beberapa anggota.

Sedangkan struktur kepemimpinan FPI tersusun dalam dua komponen, yaitu Majelis Syura dan Majelis Tanfidz. Majelis Syura adalah dewan tertinggi Front Pembela Islam yang dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang sekertaris. Majelis Syura dalam melaksanakan tugasnya didampingi lima wakil ketua yang masing-masing adalah dewan tertinggi Front. Dewan tinggi front ada lima yaitu :

1. Dewan Syari'at
2. Dewan Kehormatan
3. Dewan Pembina
4. Dewan Penasehat
5. Dewan Pengawas<sup>45</sup>

FPI juga memiliki 4 Badan Khusus, yaitu :

1. BIF : Badan Investigasi Front

BIF bertugas untuk melakukan investigasi terhadap, berbagai persoalan yang berdampak buruk terhadap Islam dan FPI, BIF memiliki dua divisi

- a. Devisi Intelejen

Devisi ini bertugas melakukan pengawasan secara rahasia terhadap segala aktivitas yang merugikan Islam dan FPI.

- b. Devisi Pencari Fakta

---

<sup>45</sup>Jajang Jahroni dan Jamhari. *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*. (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.2004). h.149-150



Devisi ini bertugas mencari dan menghimoun berbagai fakta dan data untuk membuktikan keakuratan intelejen FPI

2. BTF : Badan Anti Teror Front

Ancama intimidasi dan berbagai teror hampir setiap saat menghampiri setiap aktivitas FPI, dalam hal ini BTF memainkan peran penting untuk mengantisipasi, menghadapi, dan melawan segala bentuk teror tersebut. BTF bekerja sama dengan BIF untuk melakukan “kontra teror” maupun “kontra intelejen” terhadap musuh-musuh Islam yang melakukan teror ataupun penyusupan aktivitas umat Islam.

3. LEF : Lembaga Ekonomi Front

Tugas LEF adalah membangun ekonomi FPI agar tidak menjadi organisasi lemah. Untuk itu, LEF berkewajiban melakukan terobosan-terobosan bisnis yang berprospek, sehingga kedepan FPI mampu memiliki “Profit Center” yang tangguh untuk mendanai perjuangan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

4. BHF : Lembaga Bantuan Front

BHF telah menunjukkan eksistensinya, sebagai Lembaga Bantuan Hukum FPI. Sejak FPI berdiri hingga kini, tanpa mengenal lelah dan tanpa pamrih secara terus-menerus melakukan litigasi advokasi untuk aktivitas FPI.

Selain itu FPI memiliki 4 anak organisasi

1. Laskar Pembela Islam (LPI)

LPI adalah barisan pemuda yang menjadi satuan tugas organisasi dengan fungsi serba guna. Struktur kepemimpinan LPI berdasarkan jabatan dan kepangkatan yang ditentukan mulai karir dan prestasi para anggotanya.

## 2. Mujahidah Pembela Islam (MPH)

MPI adalah barisan muslimat FPI selama ini aktivitasnya masih terfokus kepada masalah-masalah sosial kemasyarakatan .

## 3. Serikat Pekerja Front (SPF)

Serikat Pekerja Front adalah perhimpunan para anggota yang bekerja sebagai buruh/pegawai/karyawan diberbagai pabrik dan perusahaan.

## 4. Front Mahasiswa Islam (FMI)

Sejumlah mahasiswa yang selama ini aktif dikelaskaran FPI berkeinginan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar bukan saja secara fisik. Namun mereka juga ingin beramar ma'ruf nahi mungkar dengan kemampuan intelektual yang dimilikinya.<sup>46</sup>

Dari gambaran kepemimpinan dan struktur organisasi FPI serta eksistensi FPI yang berskala nasional, maka secara normatif (sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FPI), maka Kota Makassar sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dan identitasnya sebagai sebuah Kota Madya, maka wajib untuk dibentuk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Perintah untuk membentuk DPW, termasuk DPW di Kota Makassar merupakan kewajiban Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam

---

<sup>46</sup>Nurotul Badriyah. "Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dalam Perspektif Front Pembela Islam (FPI) Studi Kasus Di Surabaya. Skripsi. Mahasiswa Jurusan Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Tahun 2013.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FPI dalam Pasal 11 Point 7 huruf a menjelaskan bahwa Dewan Pimpinan Daerah wajib membentuk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di seluruh daerahnya

Dan untuk merealisasikan tujuan organisasi, dan dalam upaya memaksimalkan kerja organisasi, yakni jamaah FPI dan laskar FPI. Jamaah FPI ini melaksanakan kegiatan sosial keagamaan seperti pengajian, bakti sosial, dan pendidikan. Sedangkan laskar FPI bertugas melakukan pressure fisik untuk memberantas kemaksiatan secara langsung, seperti penyerbuan tempat hiburan, sweeping, dan demonstrasi seluruh aktivitas FPI ditangani secara langsung dan dikomandoi oleh ketua umum<sup>47</sup>




---

<sup>47</sup>Nurotul Badriyah. "Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dalam Perspektif Front Pembela Islam (FPI) Studi Kasus Di Surabaya. Skripsi. Mahasiswa Jurusan Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Tahun 2013.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Konstruksi Gerakan Ideologi Front Pembela Islam Di Kota Makassar

Pasca tumbangannya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 dalam situasi politik yang sedang mengalami perubahan tersebut, muncul dan berkembang gerakan-gerakan sosial dan keagamaan, baik yang menuntut perubahan politik maupun gerakan-gerakan sosial dan keagamaan di daerah-daerah yang menuntut keadilan ekonomi politik. Aktor baru ini berbeda dengan aktor gerakan Islam lama, seperti NU, Muhamadiyah, Persis, al Irsyad, al Wasliyah, Jamaat Khair dan sebagainya. Organisasi gerakan Islam baru ini memiliki basis ideologi, pemikiran dan strategi gerakan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam sebelumnya, memiliki karakter yang lebih militan, radikal, skripturalis, konservatif, dan eksklusif dengan visi dan misi mewujudkan penerapan syari'at Islam secara menyeluruh, sehingga memperoleh keberuntungan hidup dunia-akhirat dan membawa rahmat bagi bangsa Indonesia.<sup>48</sup>

Islam sebagai alternatif (*al-Islam kabadil*), Islam adalah solusi (*al-Islam huwa al-hall*). Syariat Islam adalah solusi massif, dan merupakan jargon-jargon yang menyemangati gerakan mereka. Andri Rosadi mengidentifikasi bahwa organisasi ini adalah: Kelompok Tarbiyah, yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar

---

<sup>48</sup> Wahyuni. *Gerakan Sosial Islam*. (Alauddin University Press. Makassar. 2014.) h.7.

Jihad (Yogyakarta), Laskar Jundullah (Sulawesi Selatan), dan Front Pembela Islam (FPI).<sup>49</sup>

Meluasnya gerakan Islam yang hendak mewujudkan simbol-simbol Islam secara legal formal merupakan wujud dari kesadaran syari”at yang selama ini sulit terartikulasikan. Fenomena ini bukanlah sebuah gejala politik yang baru sama sekali dan bukan pula fenomena tunggal, melainkan telah muncul jauh sebelum Indonesia merdeka dan berhubungan dengan fenomena sosial lainnya.<sup>50</sup> Front Pembela Islam (FPI) yang merupakan organisasi lintas organisasi keagamaan dan lintas partai yang lahir pasca orde baru yang menganut paham *ahlus sunnah wal jama’ah* salah satunya. Sepanjang seseorang itu masih menganut paham *ahlus sunnah wal jama’ah*, seseorang itu bisa menjadi anggota FPI. Seperti yang di ungkapkan oleh Ustadz Khairul dalam wawancara yang dilakukan

“selama ini perekrutan anggota FPI di kota Makassar tidak terlalu di persoalkan, selama seseorang tersebut menganut paham *ahlus sunnah wal’jama’ah* ia bisa masuk kedalam anggota FPI mengenai proses perekrutannya ia tidak mempermasalahkannya”.<sup>51</sup>

Dalam konteks ini, *ahlus sunnah wal jama’ah* ditafsirkan sebagai paham keagamaan dengan pengertiaanya yang luas meliputi siapapun dan kelompok manapun selama yang bersangkutan berpedoman pada Al.Qur’an, hadis, ijma, dan qiyas sebagai sumber hukum. Akan tetapi pemahaman FPI tentang *ahlus sunnah*

<sup>49</sup>Andri Rosaidi. *HITAM PUTIH FRON PEMBELA ISLAM (FPI)*. Jurnal.cetakan I, Juli (2008). 237 halaman.

<sup>50</sup>Syarifuddin Jurdi. *Pemikiran Politik Islam Indonesia*. (Pt. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2008. h.202.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ustadz Khairul Panglima FPI Kota Makassar. Pada tanggal 6 oktober. 15.45 wita.

*wal jama'ah* tidak sama dengan apa yang dipahami oleh kalangan NU dan Muhammadiyah.

*Ahlus sunnah wal jam'ah* yang dipahami oleh FPI adalah mereka yang telah sepakat untuk berpegangan dengan kebenaran yang pasti sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dan mereka itu adalah para sahabat dan tabi'in (orang yang belajar dari sahabat dalam pemahaman dan pengambilan ilmu). Mereka tidak sepakat yang mengatakan bahwa asal mula Aswaja adalah dari Abu Hasan Al-Asy'ri dan Abu Mansur Al-Maturidi. Yang menjadi acuan paham keislaman warga NU dan Muhammadiyah, Achamd Masqud menjelaskan bahwa paham Aswaja mengikuti mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) dalam bidang fiqih, mengikuti Al-Ghazali dan Abu Al-Qosim Al-Junaidy dalam bidang tasawuf, dan mengikuti Al-Bukhari dan Muslimi dalam bidang Hadits.<sup>52</sup>

Front Pembela Islam sendiri mengakui keragaman mazhab keagamaan seperti yang ada dalam khazanah keilmuan Islam, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Al Qur'an merupakan rujukan utama, sementara Sunnah Rasul merupakan sumber kedua yang menjadi hujjah agama. Selanjutnya menyangkut konsep *ahlus sunnah wal jama'ah*, bagi FPI umat Muhammad senantiasa mempunyai kejelasan sikap dan perilaku, semaksimal mungkin berusaha mengikuti cara dan tata cara Nabi, tidak menaifkan peran dan suri tauladan para sahabat

---

<sup>52</sup>Nurotul Badriyah. "Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dalam Perspektif Front Pembela Islam (FPI) Studi Kasus Di Surabaya. Skripsi. Mahasiswa Jurusan Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Tahun 2013.

yang menjadi penerus Nabi Muhammad. Inilah pemahaman FPI mengenai nilai-nilai *ahlus sunnah wal jama'ah*.<sup>53</sup>

Front Pembela Islam sendiri memiliki prinsip perjuangan *amar ma'ruf nahi munkar*. Rujukan ini didasarkan pada dalil Al.Qur'an surah Ali Imron ayat 104 dan 110 yang menyatakan perintah tersebut

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahan

104. dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Terjemahan:

110. kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

[217] Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

Dalam ayat tersebut dengan jelas Allah menegaskan bahwa umat Islam adalah sebaik-baik umat yang senantiasa berbuat baik sehingga keberadaanya yang besar manfaatnya bagi segenap umat manusia. Dengan *amar ma'ruf nahi munkar* berarti menyempurnakan bagian umat yang lain tidak ada yang

<sup>53</sup>Jajang Jahroni dan Jamhari. *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*. (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.) h.146-147.

memerintahkan untuk melaksanakan semua maruf bagi kemashalatan seluruh lapisan manusia dan tidak pula melarang semua orang dari berbuat kemungkaran.

Menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa *amar ma'ruf nahi mungkar* adalah merupakan tuntunan yang diturunkan Allah dalam kitab-kitabnya, disampaikan Rasul-Rasulnya, dan merupakan dari *syari'at* Islam. Adapun pengertian nahi mungkar menurut Ibnu Taimiyah adalah mengharamkan segala bentuk kekejian, sedangkan amar mar'ruf adalah menghalalkan semua yang baik.

Konsep *amr ma'rûf dan nahi munkar* merupakan dua konsep utama dalam gerakan FPI. Apapun yang mereka lakukan berupa kegiatan pengajian atau aksi di jalanan, tidak bisa dilepaskan dari dua konsep ini. Katagori perbuatan ma'rûf dan munkar yang FPI definisikan, selain bidang agama mencakup bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Terkait kemungkaran, katagori di atas masih bisa diklarifikasikan ke dalam beberapa katagori yang lebih besar, yaitu: Pertama, katagori penyakit masyarakat (kemaksiatan), di antaranya premanisme, minuman keras, perjudian, pelacuran, narkoba, pornografi, dan pornoaksi. Kedua, katagori penyimpangan agama, di antaranya pelecehan agama, praktik perdukunan, penyimpangan aqidah, pemurtadan, sekularisme, pluralisme, ketidakpedulian pada agama dan umat Islam, serta penolakan aplikasi sharî,ah. Ketiga, katagori ketidakadilan dan kezaliman, di antaranya penculikan aktivis FPI dan fitnah. Keempat, kategori sistem non-Islam, yaitu: nation state, ekonomi sosialis/kapitalis. Kategori-kategori di atas merupakan wacana utama yang berkembang dalam FPI. Oleh karena itu, fokus FPI lebih pada aksi langsung memberantas kemaksiatan, karena dalam pikiran mereka kategori munkar jauh



lebih dominan dibanding *ma'rûf*, yang memiliki aplikasi sosial yang sangat luas, dan bukan perbuatan pribadi.

Tujuan utama dari FPI adalah menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. *Amar ma'ruf* adalah perintah untuk melaksanakan segala perkara yang baik menurut hukum syara' dan hukum akal. Sedangkan *nahi mungkar* adalah mencegah setiap kemungkaran /kejahatan, yakni setiap perkara yang dianggap buruk oleh *syara'* dan hukum akal. Selain itu tunduk pada *syari'at Islam* dan tunduk pada hukum Negara selama tidak berbenturan dengan ajaran Islam. Sehingga, bila peraturan dan perundang-undangan negara yang bertolak belakang dengan *syari'at Islam*, maka FPI dalam perjuangannya akan berusaha untuk menyiasatinya hingga terhindar dari jebakan melawan hukum negara.

Hal ini dibuktikan dengan adanya gerakan FPI yang mengutamakan metode kebijaksanaan dan lemah lembut melalui langkah-langkah mengajak hikmah (kebijaksanaan, lemah lembut), memberi *mau'idzah hasanah* (nasehat yang baik), dan berdiskusi dengan cara terbaik. Sedangkan dalam melakukan *nahi mungkar*, FPI mengutamakan sikap yang tegas melalui langkah-langkah menggunakan kekuatan bila mampu dan lisan dan tulisan, bila kedua langkah tersebut tidak mampu dilakukan maka *nahi mungkar* dilakukan dengan menggunakan hati yang tertuang dalam ketegasan sikap untuk tidak menyetujui segala bentuk kemungkaran.

Penegakan *amar ma'ruf nahi mungkar* adalah perangkat gerakan yang digunakan FPI dalam mewujudkan nilai-nilai syariah di Indonesia. Diterapkannya *syari'at Islam* di Indonesia, baik secara substantial maupun formalitis, merupakan

visi yang ingin dicapai FPI. Dari berbagai alternatif cara untuk mewujudkan visi tersebut, maka strategi yang dipilih FPI adalah penengakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, yaitu upaya-upaya sistimatis untuk menjalankan perintah agama secara kompherensif, dan mencegah umat Islam agar tidak terjerumus pada kegiatan-kegiatan yang merusak moral dan akidah Islamnya. Pendekatan solusi ini dipilih karena saat FPI didirikan tahun 1998 belum ada ormas Islam yang berkecimpung pada *amar ma'ruf nahi mungkar* secara tegas dan kongkrit. Upaya mengisi kekosongan wilayah perjuangan ini merupakan terorganisir dan sistimatis untuk memenuhi kewajiban kolektif umat Islam dalam memberantas kejahatan kemungkaran.

Apa yang diyakini FPI tentang pemahaman mereka tentang "*khairu ummah*" (umat yang terbaik) berdampak pada pemahaman mereka tentang *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam menciptakan masyarakat yang lebih relejius tidak ada cara lain selain penegakan *amar ma'ruf nahi mungkar* secara totalisme. Doktrin pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* yang di emaban oleh FPI mengarahkannya kepada totalisme Islam, totalisme Islam hanya bisa tercapai lewat penengakan *syari'at Islam*.<sup>54</sup>

Sejak awal Front Pembela Islam (FPI) yang didirikan di Kota Makassar pada tahun 2005 yang memiliki pengikut hingga ratusan jiwa yang tersebar di Kota Makassar memang di desaian sebagai organisasi keagamaan, dengan membawa visi misi meneggakan *amar maruf nahi mungkar* untuk penerapan *syari'at Islam* secara kaffah, tetapi FPI juga dapat bertindak sebagai organisasi politik. Istilah

---

<sup>54</sup>Jajang Jahroni dan Jamhari. *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*. (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.2004). h.1141-142.

“*Islam Kaffah*” oleh banyak kalangan gerakan Islam merupakan suatu konsep konsep yang paling penting bagi mereka. *Islam kaffah* sebagai cita-cita ideologis adalah konsep yang di pahami dari Q.S. Al Baqarah ayat 208 yang memerintahkan manusia masuk kedalam Islam secara kaffah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُبِينٌ

208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.<sup>55</sup>

Dalam ayat tersebut sesungguhnya kata “Kaffah” tidak bergandengan dengan kata “Islam”. Jadi ayat tersebut tidak menggunakan “Islam Kaffah”, tetapi menggunakan kata “al Silmi” dalam ayat tersebut identik dengan kata “Islam”, karena ia berasal dari akar kata yang sama S-L-M yang berarti penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas, sementara “kaffah” berarti semuanya atau seluruhnya.<sup>56</sup>

Dalam pandangan banyak orang, konsep Islam mungkin terwujud dalam bentuk potong tangan, mencambuk pezina, mencambuk orang mabuk, merajam, qishash, dan menerapkan hukum-hukum syariat melalui pelaksanaan sanksi-sanksi atau dalam urusan muamalah yang lain. Namun, gambaran tentang konsep Islam seperti itu adalah gambaran yang parsial (terpotong-potong).

Arti solusi Islam adalah Islam sebagai pengarah dan petunjuk bagi masyarakat dalam setiap bidang, baik materi maupun maknawi. Arti solusi Islam adalah kehidupan, dalam segala aspeknya, mengarah kepada suasana Islami dan dengan

<sup>55</sup>Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 208.

<sup>56</sup>Dr. Mahmudin, M. Ag. *Polemik Formalisme Agama Di Sulawesi Selatan*. (Alauddin University. Makassar. 2012.) h.169-170.

bentuk Islami. Makna solusi Islam adalah aqidah masyarakat haruslah aqidah Islam, syiarnya adalah syiar Islam, pemikirannya adalah pemikiran Islam, akhlak dan pendidikannya berlandaskan Islam. Dengan kata lain, solusi Islam adalah sistem yang menampakkan masyarakat muslim dengan norma-norma Islam

Penerapan *syari'at* Islam yang di dukung FPI bukan berarti mengganti dasar negara dan bentuk negara. FPI menganggap bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah fainal. Yang di persoalkan FPI adalah adanya hukum *syari'at* Islam yang sudah baku sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Penegakan *syari'at* Islam oleh negara adalah dalam rangka mencegah umat agar tidak jatuh kedalam lembah kemungkaran sekaligus memanfaatkan kekuasaan untuk meninggikan kalimat Allah. *Syari'at Islam* bersifat universal dan menyeluruh dalam pengertian bahwa ia bisa diberlakukan kapan pun dan dimanapun.

Dalam penegakkan *syari'at Islam* yang di lakukukan oleh FPI, teori gerakan sosial menyebutnya sebagai *gerakan reformasi*. Gerakan reformasi adalah gerakan sosial yang berbeda menurut bidang perubahan yang di inginkan. Ada yang terbatas tujuannya hanya untuk mengubah aspek tertentu kehidupan masyarakat tanpa menyentuh inti struktur institusinya, gerakan yang hanya menginginkan perubahan di dalam ketimbang perubahan masyarakatnya sebagai keseluruhan.

Front Pembela Islam (FPI) yang salah satu organisasi keagamaan yang membangkitkan kembali label formal Islam dan penerapan *syari'at Islam*, tergolong Islam ideologis atau dalam istilah yang belakangan populer disebut Islamisme. Dikatakan Islam ideologis, karena watak dan orientasi keagaamaanya

berbasis pada pandangan Islam sebagai ideologi, yang mempertautkan secara langsung hubungan Islam dengan negara atau politik serta memperjuangkan cita-cita politik Islam. Islamisasi harus dilakukan melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial dan politik.<sup>57</sup>

Pada dasarnya Allah telah memberikan ruang lingkup yang sangat luas bagi hamba-Nya untuk melaksanakan segala aktivitasnya sebagai kodrat manusia dalam rangka mengabdikan pada sang pencipta. Kewenangan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya melalui Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada penerapan hukum-hukum Allah, tetapi juga kewenangan membuat aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan hal-hal yang tidak diatur syaria' secara tegas dan rinci, politik salah satunya. Dalam Islam cita-cita politik yang dijanjikan Allah kepada orang-orang beriman dan beramal shaleh dalam Al-Qur'an adalah terwujudnya sebuah sistem politik, berlakunya hukum Islam dalam masyarakat, dan terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat.<sup>58</sup>

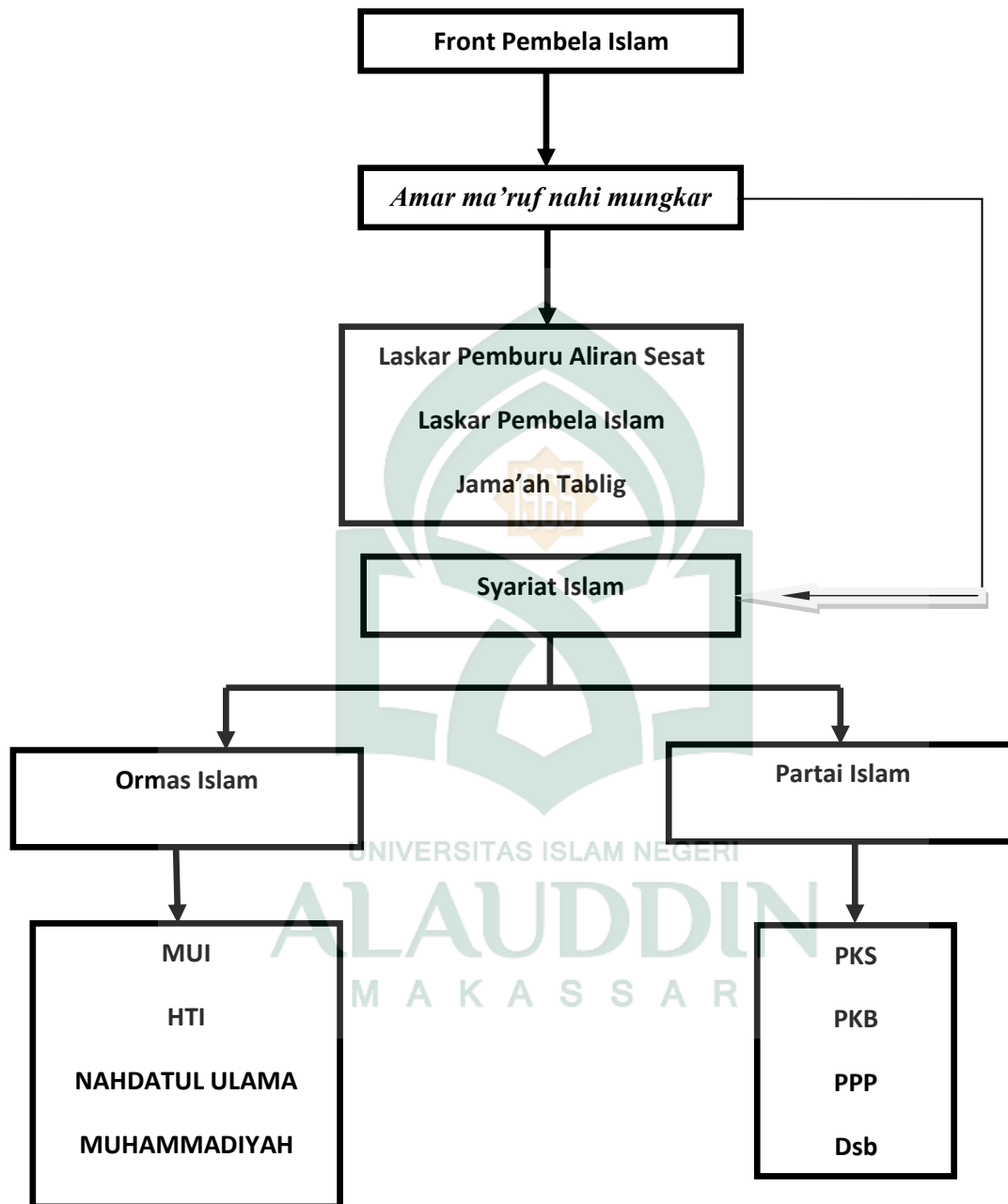



---

<sup>57</sup> Syahrir Karim dan Samsu Adabi Mamat. *Islamisme Dan Demokrasi Di Indonesia Pasca Reformasi : Analisis Sosio-Politik*. Jurnal. Jurusan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2012.

<sup>58</sup> Abdul Muin Salim. *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al Qur'an*. (PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.) h.290-291.

**Pola Gerakan Politik Front Pembela Islam Di Kota Makassar.**



Proses reformasi yang terjadi memang memberikan angin segar kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkelompok yang selama 30 tahun terkungkung oleh kekuasaan orde lama. Reformasi adalah perubahan sesuatu menuju kondisi yang lebih baik. Gerakan reformasi adalah gerakan yang mengajak seluruh segmen masyarakat untuk memperbaiki apa yang telah rusak diberbagai bidang dan membawa kehidupan keningkat yang lebih tinggi dalam kemajuan manusia.

Di era reformasi dewasa saat ini terdapat banyak partai Islam maupun partai yang berbasis dukungan umat Islam dan gerakan organisasi yang berbasis keagamaan. seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fenomena banyaknya partai Islam ataupun partai berbasis dukungan umat Islam dan organisasi yang berbasis keagamaan merupakan refleksi dari kemajemukan umat Islam dan keragaman kepentingan kelompok Islam

Jadi, reformasi satu-satunya kunci pembuka jalan bagi demokrasi saat ini. Ada yang mengatakan bahwa reformasi adalah proses redemokratisasi. Partai-partai politik, kekuatan sosial, dan para aktor politik kini tengah berlomba untuk menawarkan beragam konsep dan program demokrasi dalam memasuki era Indonesia baru menuju rakyat sentosa, adil, dan makmur. Kepemimpinan Islam tidak akan terwujud, kecuali dengan adanya kebebasan memilih serta baiat yang benar, bukan karena tekanan atau perlawanan.

Demokrasi merupakan kata dan istilah dari barat yang digunakan untuk menunjukkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat dianggap sebagai penguasa mutlak dan pemilik kedaulatan. Rakyat berhak mengatur sendiri urusannya serta melaksanakan dan menjalankan sendiri kehendaknya.<sup>59</sup>

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dibuat oleh manusia dalam rangka membebaskan manusia dari kezhaliman dan penindasan para penguasa atas nama agama. Demokrasi adalah suatu sistem yang bersumber dari manusia dan tidak ada hubungannya dengan wahyu atau agama. Untuk mewujudkan sistem demokrasi membutuhkan gerakan politik untuk membentuk stabilitas antara masyarakat dan pemerintahan, karena dalam sistem ini terjadi satu kontrak politik antara penguasa dengan masyarakat dalam menjalankan sistem pemerintahan.<sup>60</sup>

Runtuhnya rezim Orde Baru menandakan lahirnya era demokratisasi di Indonesia. Kelompok yang berbasis identitas mulai bebas menyuarakan kepentingannya. Salah satunya ialah Front Pembela Islam (FPI). Front Pembela Islam (FPI) memiliki kesempatan terbuka untuk menyuarakan kepentingannya, khususnya dalam sistem politik Indonesia. Kelompok ini kemudian dikenal pula sebagai istilah kelompok yang berlandaskan ideologi Islam, yaitu kelompok yang memperjuangkan penegakan nilai-nilai Islam dan penegakan *syari'at* Islam dalam sistem demokrasi di Indonesia.

---

<sup>59</sup>Darmawati. *Demokrasi Dalam Islam "Suatu Tinjauan Fikih Siyasah"*. (Alauddin University Pres. Makassar. 2013) h.30.

<sup>60</sup>Abdul Qadim Zallum. *Demokrasi Sistem Kufur*. (Pustaka Thariqul Izzah. Depok. 2009). h.2.



Gerakan politik sudah lama menjadi bagian dari kiprah umat Islam di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam, termasuk di Indonesia. Gerakan politik merupakan bagian dari aktualisasi peran kewarganegaraan yang dimiliki oleh masyarakat muslim dalam memperjuangkan kepentingan mereka dalam lingkup negara. Dalam gerakan politik Islam, landasan berfikir dan bergerak yang dipakai tentu saja bersumberkan dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam sejarahnya, gerakan politik Islam berasal dari cita-cita mewujudkan masyarakat Madani yang dideklarasikan oleh Rasulullah melalui Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan rumusan tentang prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum Yastrib (Madinah) di bawah pimpinan Nabi Muhammad dengan berbagi kelompok bukan muslim pada saat itu untuk membangun suatu masyarakat politik bersama itu.

Gerakan politik Islam bisa dilihat dari gerakan structural dan kultural, tipikal utama ditandai dengan banyaknya pendirian partai-partai Islam, seperti Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan tipikal yang kedua ditandai dengan maraknya sejumlah gerakan (ormas) Islam seperti Hizbur Tahrir Indonesia (HTI), Forum Komunikasi Ahlulsunnah Waljamaa'ah, dan Front Pembela Islam (FPI).

Gerakan politik Islam di Indonesia telah dilakukan dalam berbagai format. Dari format gerakan kepartaian, gerakan moral-sosial, gerakan ekstraparlamentar serta, tentu saja, gerakan keagamaan. Semua gerakan tersebut, masing-masing ternyata mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Dikaitkan dengan problem ashabiyah yang melingkupi suasana psikologi gerakan politik Islam,

masing-masing format gerakan selalu menemukan jalan buntu dalam memecahkan problem sosial politik umat. Menanggapi kebuntuan gerakan politik Islam dalam menemukan solusi terhadap persoalan umat, di Indonesia, sesungguhnya dibutuhkan alternatif-alternatif baru guna mendapatkan suatu gerakan yang bisa memberikan jawaban atas problem-problem masyarakat.

Dalam satu negara yang menganut paham demokrasi, salah satu penilaian demokrasi itu bisa di nilai berjalan secara baik apabila di tandai dengan terjadinya pemilihan umum. Dalam hal ini ketua DPP FPI kota Makassar dalam wawancara yang dilakukan berpendapat

*“bahwa pemilu yang dikembangkan dan dilaksanakan di Indonesia khususnya Di Kota Makassar adalah berbasiskan pada sistem ideology sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme yang merupakan akidah bagi kaum sekuler dan liberalis yang dilancarkan oleh kaum sekuler untuk menggantikan akidah Islam sebagai landasan hidup manusia melaui sistem ini para kaum sekuler melakukan penjajahan terhadap umat muslim, maka dari itu umat muslim wajib bangkit dan kembali kepada politik Islam yang sudah terbukti memberikan kejayaan. Dan kewajiban umat Islam adalah mengembalikan sistem pemilihan kepemimpinan yang berbasiskan Asyu’ra”<sup>61</sup>*

Dalam sebuah teori gerakan sosial penolakan FPI terhadap pemilu dan ingin mengantinya dengan sistem syur’a disebut sebagai *gerakan progresif*. Yang dimana ia ingin memperkenalkan sistem, bentuk kehidupan baru, dan keyakinan baru yang berlandaskan Al-Qur’an. Karena, menurut FPI pemilu yang di kembangkan di Indonesia khususnya di kota Makassar telah merusak aqidah umat Islam karena berlandaskan paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme yang menurutnya tidak sesuai di terapkan di Indonesia khususnya di kota Makassar karena tidak sesuai dengan aqidah umat Islam.

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Ustazd Agus Salim Selaku ketua DPP FPI Makassar. Pada tanggal 7 oktober 2016. Pukul 16.55 wita.

Dikalangan pakar Islam terdapat perbedaan dalam menganggapi permasalahan syura dan demokrasi. Sebagian ada yang memandang syura dan demokrasi adalah dua hal yang identik, sebagian lain memandangnya sebagai dua konsep yang berlawanan, sedangkan yang lain memandang keduanya mempunyai persamaan yang erat, disamping juga terdapat juga perbedaaan-perbedaan. Al Qur'an menggunakan kata syura dalam surah Al-Syura ayat 38 dalam ayat ini berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahan :

38. dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.<sup>62</sup>

Kata syura berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah. Musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat untuk memperoleh kebaikan). Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.<sup>63</sup>

Dalam sejarah Islam syura pertama kali muncul ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Dalam hal ini ketika Abu Bakar As-Shidiq terpilih sebagai Khalifah yang

<sup>62</sup> Al Qur'an Surah Al-Syura ayat 38.

<sup>63</sup> M. Syafi'I Anwar. *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia*. (Paramadina. Jakarta. 1995.) h.223.

pertama setelah terjadi pertemuan di balai Bani Sai'dah. Dalam pidato pertamanya Abu bakar menyatakan bahwa dirinya telah menerima mandat dari rakyat yang memintanya melaksanakan Al. Qur'an dan Sunnah. Abu bakar juga menyatakan bahwa selama ia melaksanakan ketentuan Al. Qur'an dan Sunnah, ia perlu didukung terus. Tetapi bilamana ia melakukan pelanggaran berat maka ia harus diturunkan

Menurut Rahman, pidato yang dilakukan Abu Bakar “jelas menguatkan bahwa “negara Islam” mendapatkan sanksinya dari komonitas Islam, dan arena sepenuhnya demokratik.” Adapun bentuk-bentuk demokrasi, lanjut Rahman dapat berbeda-beda menurut kondisi yang ada dalam masyarakat. Yang paling pokok adalah prinsip syura yang dipertahankan dan dihormati secara sadar sehingga, umat Islam bebas menentukan tipe sistem politik demokrasi yang mereka inginkan.<sup>64</sup>

Konsep Ibnu Taimiyah tentang musyawarah atau konsultasi sama luasnya dengan konsep yang dikemukakan tentang bai'ah, ia menghendaki adanya musyawarah yang lebih efektif dan umum. Dia juga menegaskan bahwa seorang pemimpin seharusnya tidak hanya meminta pertimbangan dari ulama, tetapi semua kelas dalam masyarakat dan siapa saja yang mampu memberikan pendapat yang dinamis.

Dalam musyawarah segala apa yang sudah ada ketetapan hukum Allah dan Rasul-Nya itu tidak boleh dirubah, yang dimusyawarakan hanya teknisnya saja.

---

<sup>64</sup>M. Syafi'I Anwar. *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia*. (Paramadina, Jakarta. 1995.) h.224.

Contohnya seperti minuman keras, hukumnya sudah haram tidak boleh diganti lagi. Namun, berbeda dengan demokrasi, dengan suara terbanyak minuman keras menjadi boleh. Contohnya, Kepres No 3/thn 1997 tentang bolehnya miras beredar di masyarakat dengan kadar di bawah 5%

Jika musyawarah maksudnya adalah prinsip partisipasi politik dalam pemikiran barat, maka prinsip “*amar ma'ruf nahi munkar*” yang merupakan tujuan kewenangan Islam, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Tamiyah: “semua kewenangan dalam Islam tujuannya hanyalah *amar ma'ruf nahi munkar*, pada hakikatnya tersimbol dalam tugas pengawasan atas orang-orang yang memiliki kekuasaan, berarti mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam perkara-perkara umum dan juga dalam hukum, berawal dari kewajiban memberi nasehat (yang tulus) yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an surah At-Taubah ayat 91

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا  
نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩١﴾

Terjemahan :

91. tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka Berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,

Sejak awal Front Pembela Islam (FPI) yang didirikan di Kota Makassar pada tahun 2005 memang di desai sebagai organisasi keagamaan, dengan membawa

visi misi menegakkan *amar maruf nahi mungkar* untuk penerapan *syari'at Islam* secara kaffah, tetapi FPI juga dapat bertindak sebagai organisasi politik.

Dengan landasan *amar maruf nahi mungkar*, FPI mencoba merangkainya menjadi sebagai metode perjuangan termaksud dalam kegiatan politiknya. Secara garis besar, agenda yang di emaban oleh FPI, yakni melanjutkan kehidupan Islam dalam syari'at Islam. Dalam melakukan segala aktivitas oprasional politik, FPI merujuk Surat Ali Imron ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ

Terjemahan

104. dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.

[217] Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.<sup>65</sup>

Kegiatan politik yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) berbeda dengan organisasi politik yang sudah ada pada saat ini. Dalam gerakan politik FPI memang tidak berafilisiasi terhadap salah satu kekuatan politik tertentu saja tetapi mempunyai sikap netral terarah. Yang di maksud netral terarah adalah tidak berkampanye untuk satu partai tertentu, sedangkan terarah berarti FPI hanya mendukung partai Islam yang memperjuangkan hak-hak Allah dan hak-hak makhluk-Nya dengan menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Dengan ungkapan

<sup>65</sup> Al Qur'an Surah Ali Imron ayat 104.

lain, penegakan moral dan agama merupakan kegiatan FPI yang utama,<sup>66</sup> seperti yang di ungkapkan oleh ketua FPI Kota Makassar saat ini ustazd Agus Salim dalam wawancara yang dilakukan ia mengungkapkan

*“selama ini FPI tidak pernah menyentuh ranah politik di Kota Makassar, tetapi FPI secara institusi sangat mendukung pemilu atau pemilukada yang selama ini terjadi di kota Makassar dan tidak melarang anggotanya untuk menggunakan haknya dalam pemilu atau pemilukada FPI hanya menyarankan kepada setiap anggotanya hanya mendukung Partai Islam yang menyuarakan kepentingan umat muslim”*<sup>67</sup>

Dari ungkapan diatas, untuk menjagah kemurnian perjuangan FPI dalam dunia politik, maka FPI tidak terlibat dalam politik praktis atau berpihak secara politik terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia khususnya di Kota Makassar. FPI juga tidak berfalsifikasi atau bekerjasama secara struktural dengan partai manapun baik local maupun internasional. Motif untuk memperjuangkannya *syari'at Islam* adalah langkah yang sah, sedangkan aksi-aksi untuk memperjuangkannya diupayakan untuk tetap tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. . Keberadaan FPI dalam posisi organisasi keagamaan sangat besar peluangnya untuk melakukan fungsi pengawasan, kontrol, saran serta kritik dalam rangka memasukan ide-ide penerapan *syari'at Islam* demi kepentingan umat Islam. Dari sini dapat dilihat bahwa arah gerakan politik FPI dalam mendukung penerapan *syari'at Islam* sangat tinggi dengan melakukan pendekatan dengan menggunakan metode perjuangan amar maruf nahi mungkar dan melakukan berbagai kegiatan yang mengarah doktrin ideologi mereka yang beraliran *ahlul sunnah wal'jamaah*.

---

<sup>66</sup>Jajang Jahroni dan Jamhari. *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*. (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.2004). h.137.

<sup>67</sup>Wawancara dengan Ustazd Agus Salim selaku ketua FPI Kota Makassar. Pada tanggal; 6 Oktober.

Pada “Gerakan Islam Simbolik Politik Kepentingan FPI”. Kajian buku ini mengajak membaca untuk mencermati secara kritis segala sesuatu yang terkait dengan gerakan Islam dengan menggunakan simbol-simbol agama di setiap aksi atau gerakan yang mereka (FPI) lakukan, cermin dari adanya proses komodifikasi dan politisasi agama dalam proses sosial. Dalam gerakan ini, Islam hanya berfungsi sebagai alat legitimasi gerakan politik. Sebab, pada hakikatnya gerakan ini hanya merupakan perpanjangan tangan dari suatu kekuatan politik yang sebenarnya tidak memiliki spirit keagamaan. Di sini, penggunaan simbol, bahasa, dan tokoh Islam hanya sebagai bungkus untuk menutupi kepentingan politik yang sedang dimainkan.<sup>68</sup>

Melakukan korelasi terhadap penguasa diperintahkan Allah atas kaum muslimin dan merupakan tugas individu sebagai pribadi serta tugas tugas jama'ah sebagai kelompok. Tugas ini berkaitan dengan *amar ma'ruf nahi mungkar* yang telah disyiarkan oleh agama. Selain itu, mengoreksi para penguasa merupakan kegiatan politik, oleh karena itu akan lebih efektif apabila dilakukan oleh sebuah jama'ah atau partai politik. Keberadaan FPI dalam posisi organisasi keagamaan sangat besar peluangnya untuk melakukan fungsi pengawasan, kontrol, saran serta kritik dalam rangka memasukan ide-ide penerapan syari'at Islam demi

---

<sup>68</sup>Syaefuddin. Mahmud. *Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 34, No.2, Juli – Desember ( 2014). h.268.



kepentingan umat Islam. Dari sini dapat dilihat bahwa arah gerakan politik FPI dalam mendukung penerapan *syari'at Islam* sangat tinggi dengan melakukan pendekatan dengan menggunakan metode dakwah dan melakukan berbagai kegiatan yang mengarah doktrin ideologi mereka yang beraliran *ahlul sunnah wal'jamaah*.

Dalam sebuah negara yang menjunjung nilai demokrasi yang tinggi, salah satu nilai dalam demokrasi ialah kebebasan berpendapat atau menyampaikan pendapat di muka umum. Sebagaimana di atur dalam undang-undang Republik Nomor 9 Tahun 1998. Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, "Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas. " Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya tetap harus dipelihara agar seluruh tatanan sosial kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan,

dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>69</sup>

Dalam hal menyampaikan pendapat di muka umum, FPI sering turun ke jalan untuk menyampaikan pendapatnya yang dinilai bertentangan dengan *syari'at*

---

<sup>69</sup>[Htp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_9\\_98.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_98.htm). Diakses pada tanggal 21 Oktober 2016. Jam 14.00 wita.

Islam. Hal ini di pengaruhi oleh ideologi mereka yang menganut pemahaman *amar mar'ruf nahi mungkar*. Dalam pemahaman mereka mengenai *amar maruf nahi mungkar* mereka tidak sungkan-sungkan berlaku keras terhadap kelompok lain yang menurut mereka tidak sepaham dengan mereka.

Sebagai gambaran umum pada demo 4 November yang lalu, FPI dan para ormas lain melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD, dan depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Kota Makassar. FPI dan para ormas Islam lainnya menuntut agar Ahok di tangkap atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan di Kepulaun Seribu yang lalu. FPI mengajak seluruh kadernya di seluruh Indonesia termasuk Kota Makassar agar melakukan “Jihad Konstitusional Bela Agama dan Negara”. Seperti yang dikutip dalam pernyataan Habib Rizqieq

*“aksi 4 November bukan aksi Anti China, bukan aksi Anti Kristen, bukan aksi Anti Etnis, bukan aksi Anti Kebhinekaan, tetapi murni merupakan aksi Anti Penistaan Agama, aksi Anti ketidakadilan, jadi tujuannya jelas untuk penegakkan hukum”.*

Pada kenyataanya FPI dipandang sebagai ormas yang anarkis, tidak punya etika dan tidak memiliki solidaritas terhadap masyarakat setempat. Selain itu mereka tidak bisa diajak damai dengan musyawarah mengambil jalan tengah dalam penanganan kasus penistiaan yang di lakukan oleh Ahok. Mereka (FPI) dengan semangatnya dalam kasus ini, menuntut aparat dan pemerintah agar menangkap segera Ahok. Dan disisi lain tidak sedikit pendemo-pendemo termasuk disini juga FPI sering memancing emosi pihak kepolisian tidak ada kebijakan yang signifikan yang diberikan kepada FPI dari aparat kepolisian. Kepolisian tidak bisa bertindak apa-apa, karena memang polisi berada diposisi

yang sulit. Padahal apa yang diinginkan FPI itu sama dengan apa yang diinginkan aparat pemerintah. Akan tetapi, menurut aparat pemerintah, mereka meminta waktu untuk melakukan semuanya. Karena bagi mereka, semua mempunyai mekanisme tersendiri. FPI tidak melihat dampak apa yang telah ditimbulkan dari semua itu.

FPI memang tidak pernah mau berkompromi dengan individu atau masyarakat yang melakukan tindakan maksiat termasuk dalam hal penistaan agama yang dilakukan Ahok. Hal ini sesuai dengan apa yang selama ini yang diembankan dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dalam menegakkan *amar maruf* FPI menggunakan lemah lembut sedangkan dalam menegakkan *nahi mungkar* FPI menggunakan metode kekerasan. Seperti pada gambaran table berikut :

NO	KASUS	DESKRIPSI	LOKASI & WAKTU	PELAKU	KORBAN	TINDAKAN
1	Penyerangan ke sekretariat jamaah Ahmadiyah Indonesia (IAI)	Penyerangan tersebut dilakukan atas pandangan yang menganggap bahwa ahmadiyah adalah ajaran	Makassar, 14 agustus 2011	FPI makassar	2 orang luka-luka (aktivis lbh)	Tuduhan sesat
2.	Razia terhadap warung makan yang buka pada siang hari pada bulan	Puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI) Sulawesi Selatan menggelar razia terhadap warung-warung makan yang buka siang	Makassar, 8 agustus 2011	FPI Makassar	2 orang karyawan warung coto luka-luka	Razia warung makan

3.	FPI Cabang Makassar Himbau Tempat Hiburan Tutup Selama Ramdhan	Ratusan massa front pembela islam atau FPI menggelar razia ke sejumlah tempat hiburan dan panti pijat di kota Makassar sulawesi selatan dalam aksi kali ini	Makassar, 14 Juli 2012	FPI Makassar	Perusahaan Tempat Hiburan	Himbauan Intimidasi
----	--	---	------------------------	--------------	---------------------------	---------------------

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa adanya tindakan penyimpangan dari norma legal yang berlaku yaitu tindakan yang bersifat pengrusakan, penggerebekan, penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh organisasi Front Pembela Islam di kota Makassar. Tindakan anarkis yang dilakukan oleh FPI dengan dalil penegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* itu tidak dibenarkan. Sehingga dengan demikian, sesungguhnya tindakan FPI sebagai sebuah ormas telah melenceng dari hakikatnya sebagai ormas sebagaimana yang digariskan di dalam Undang- Undang. Selain itu juga, tindakan FPI tersebut telah mengambil alih tugas dan wewenang lembaga terkait, sehingga hal tersebut bukannya menciptakan ketertiban, Malah yang terjadi adalah sebaliknya.

FPI yang biasa dikenal sebagai kelompok “Islam radikal “yang dimana secara sederhana yang dimaksud dengan kelompok “Islam Radikal” adalah kelompok yang mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatic yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang

berlangsung.<sup>70</sup> Dalam kegiatannya mereka seringkali menggunakan aksi-aksi yang keras bahkan tidak menutup kemungkinan kasar terhadap kegiatan kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka tentang *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Dalam sebuah analisis, suatu gerakan sosial terjadi di tandai dengan adanya kemarahan dan keputusan yang melahirkan gerakan emosional yang sedemikian rupa yang disebabkan oleh adanya ketegangan sosial pada level makro masyarakat disebut Analisis ketegangan structural.<sup>71</sup> Legislative atau parlemen sebagai lembaga sekaligus wadah aspirasi rakyat lazimnya mendapat kepercayaan rakyat sepenuhnya. Kepercayaan itu akan terus ada selama jalannya lembaga tersebut sesuai dengan tujuan negara sebagaimana yang telah digariskan atau dikehendaki oleh rakyat, karena lembaga ini manifestasi dari rakyat.

Ada beberapa aktor yang bermain dalam gerakan FPI beserta pola permainannya. Mula-mula ada kepentingan politik untuk mempertahankan kepentingan dan posisi pihak tentara dan elit penguasa Orde Baru. Kelompok ini memerlukan operator politik yang tangguh dan memiliki massa serta legitimasi sosial yang kuat. Di mana pilihan jatuh pada kelompok Islam radikal. Pilihan ini didasarkan atas pertimbangan: pertama, murah dan mudah digerakkan karena wataknya yang emosional. Kedua, pemimpin gerakan ini bukanlah orang yang kritis dan memiliki pemikiran yang jauh dan komperhensif. Rata-rata pemimpin

---

<sup>70</sup>Jajang Jahroni. dan Janhari. *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*.(PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.2004.) h.2.

<sup>71</sup>Pioter Sztompaka. *Sosiologi Perubahan Sosial*. (Prenada Media Grup. Jakarta. 2011.) h.332-333.

gerakan ini berfikir simbolik, puritan, dan formal sehingga mudah dibelokkan. Ketiga, gerakan ini tidak memiliki akar sosial yang kuat sehingga mudah dipertahankan apabila tidak lagi diperlukan. Untuk merealisasi hal ini, beberapa kelompok kepentingan, melalui seorang broker dan informan, mendekati para pemimpin agama yang memiliki kriteria sebagaimana di atas. Para informan ini menjadi mediator antara kelompok kepentingan dengan para pemimpin agama. Setelah para pemimpin agama ini diberi pengarahan maka dibentuklah kelompok-kelompok gerakan islam, seperti Front Pembela Islam (FPI) dari proses ini terlihat bahwa kelahiran kelompok gerakan Islam radikal FPI merupakan bagian dari skenario politik yang memanfaatkan fanatisme Islam simbolik.

Pada dasarnya, kepemimpinan itu bersifat individualisme dan inilah yang sesuai dengan nash-nash serta realitas Islam terdahulu. Kesadaran individu inilah yang memicu laju pergerakan serta kekuasaan. Politik merupakan unsur utama dalam pembangunan masyarakat. Ia dibangun bersamaan dengan unsur lainnya, yaitu ekonomi. Kedua unsur ini dibangun setelah pembentukan ideologi. Pembangunan politik dimulai dengan pemberian kesadaran politik terhadap sekelompok orang dalam jumlah terbatas.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Perjalanan kelam dan pasang surutnya gerakan politik Front Pembela Islam dari sejarah mulai berdiri (sebelum reformasi) hingga sekarang (era demokrasi) berpengaruh terhadap corak pemikiran gerakan –gerakan penganut paham *ahlul sunnah wal'jamaah*. Karena kemunculan Front Pembela Islam ini diwarnai dengan aneka ragam gejolak situasi sosio politik yang melingkupinya. Dan yang menjadi lebih menarik dalam organisasi ini adalah keteguhannya dalam memegang prinsip dan semangat mereka dalam memperjuangkan visi dan misi penegakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Front Pembela Islam sebagai gerakan organisasi keagamaan memunculkan pandangan bahwa *syari'at Islam* harus diberlakukan di Indonesia khususnya di Kota Makassar, mengingat kondisi Bangsa Negara Indonesia dihegemoni oleh sistem yang sekuler dan kapitalis yang berdampak pada tatanan Islam sampai merusak akidah Islam. oleh karena itu, eksistensi Islam harus jelas bahwa Islam harus dilihat sebagai sebuah agama yang menawarkan bimbingan dan solusi untuk semua aspek kehidupan. Karena FPI menganggap bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga potensi dalam meneggakan syari'at Islam sangat besar.



Setelah melakukan pembahasan pada bab sebelumnya tentang konstruksi gerakan politik FPI di Kota Makassar dan korelasinya terhadap proses demokrasi di Kota Makassar, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Front Pembela Islam (FPI) sendiri merupakan organisasi lintas organisasi keagamaan dan lintas partai yang lahir pasca orde baru yang menganut paham *ahlus sunnah wal jama'ah* dan berideologis Islam atau Islamisme, yang dimana FPI mempertautkan secara langsung hubungan Islam dengan negara atau politik serta memperjuangkan cita-cita politik Islam. Front Pembela Islam sendiri memiliki prinsip perjuangan *amar ma'ruf nahi mungkar* untuk penerapan *syari'at Islam* secara kaffah . Rujukan ini didasarkan pada dalil Al.Qur'an surah Ali Imron ayat 104 dan 110 yang menyatakan perintah tersebut. Dalam penegakkan *syari'at Islam* yang dilakukan oleh FPI, teori gerakan sosial menyebutnya sebagai *gerakan reformasi*. Sejak awal Front Pembela Islam (FPI) yang didirikan di Kota Makassar memang di desain sebagai organisasi keagamaan, tetapi FPI juga dapat bertindak sebagai organisasi politik.
2. Untuk menjagah kemurnian perjuangan politik FPI, maka FPI tidak terlibat dalam politik praktis atau berpihak secara politik terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia. FPI juga tidak berfalsifikasi atau bekerjasama secara struktural dengan partai manapun baik lokal maupun internasional. Motif untuk memperjuangkannya *syari'at Islam* adalah langkah yang sah, sedangkan aksi-aksi untuk memperjuangkannya diupayakan untuk tetap tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dari sini dapat dilihat bahwa arah gerakan politik FPI dalam mendukung penerapan *syari'at Islam* sangat tinggi dengan melakukan pendekatan dengan menggunakan metode dakwah dan melakukan berbagai kegiatan yang mengarah doktrin ideologi mereka yang beraliran *ahlul sunnah wal'jamaah*.

## 2. Saran

Dari hasil analisis data dan kesimpulan, penulis mencoba memberikan saran-saran atau masukan kepada Front Pembela Islam Di Kota Makassar

1. Disarankan kepada ormas terkait agar tetap menjadikan *amar ma'ruf nahi mungkar* sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan mereka yang berbasis keagamaan maupun politik agar terciptanya masyarakat yang melanjutkan kehidupan Islam dalam syariat Islam.
2. Disarankan kepada ormas terkait agar berada di luar pemerintahan dan tetap pada posisi organisasi keagamaan agar peluangnya untuk melakukan fungsi pengawasan, kontrol, saran serta kritik dalam rangkan memasukan ide-ide Islami demi kepentingan umat Islam.

## Daftar Pustaka

Al. Qur'an Departemen Agama RI.

Adnan Amal, Taufik. *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*. Pustaka Alvabet. Jakarta. 2004.

Anwar, M. Syafi'I. *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia*. (Paramadina. Jakarta. 1995.)

Anggaran Dasar Front Pembela Islam pasal 7.

Azman. *Penerapan Syari'at Islam Di Indonesia*. Alauddin University Press. Makassar. 2014.

Creswell, John W. Penejemah Achmad Fawaid. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. PT Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2012

Darmawati. *Demokrasi Dalam Islam "Suatu Tinjauan Fikih Siyasah"*. Alauddin University Pres. Makassar. 2013.

Juudi, Syarifuddin. *Pemikiran Politik Islam Indonesia*. PT Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2008.

Pertiwi, Aulia. *"Analisi Kriminalogis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Oleh ORMAS FPI (FRONT PEMBELA ISLAM) Di Wilayah Hukum Kota Makassar (Studi Kasus : 2011-2013)"*. Skripsi Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2015.

Suryana Priyatna, Endang. *Cyber-FPI : Kontentasi Identitas Nasional Dan Identitas Islam*. Tesis Mahasiswa Jurusan Ilmu Sastra Fakultas Ilmu Pengatahuan Budaya Universitas Indonesia Depok. Juli 2012

Firdaus, Muhammad. *Komonikasi Politik Islam*. Alauddin University. Makassar. 2014.

Hadits Tirmidzi no 2095.

Jahroni, Jajang dan Jamhari. *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.

Irfan Idris. Muh. Dan Nila Satrawati. *Sosiologi Politik*. CV. Berkah Utami. Makassar. 2010.

Karim, Syahrir dan Samsu Adabi Mamat. *Islamisme Dan Demokrasi Di Indonesia Pasca Reformasi : Analisis Sosio-Politik*. Jurnal. Jurusan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2012.

Mahmudin. *Polemik Formalisme Agama Di Sulawesi Selatan*. Alauddin University. Makassar. 2012.

Muin Salim, Abdul. *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al Qur'an*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.

Rosadi, Andri. *HITAM PUTIH FRON PEMBELA ISLAM (FPI)*. Jurnal. cetakan I, Juli. 2008.

Qadim Zallum, Abdul. *Demokrasi Sistem Kufur*. Pustaka Thariqul Izzah. Depok. 2009.

Setiawan. *“Orientasi Tindakan Dalam Gerakan Nahi Mungkar Front Pemuda Islam Yogyakarta”*. Skripsi Mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

Sugiyono. Prof. Dr. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods)*. Alfabeta. Bandung. 2014.

----- *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta. Bandung. 2014.

Syaefuddin, Mahmud. *Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 34, No.2, Juli – Desember ( 2014). Hal 257-279

Sztompaka, Pieter. Penerjemah Alimandan. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada Media Grup. Jakarta. 2011.

Wahyuni. M.Si. S.Sos. *Gerakan Sosial Islam*. Alauddin University. Makassar. 2014.

Yusuf Al- Qaradhawi, Penerjemah Wahib Aziz. *Konsep Islam Solusi Utama Bagi Umat*. Senayan Abadi Publishing. Jakarta Selatan. 2004

[Htp//hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_9\\_98.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_98.htm).